



**TRANSPARANSI IMPLEMENTASI PROGRAM INTEGRASI TERNAK
UNGGAS DI KABUPATEN BANYUWANGI**

*(The Transparency Implementation Of Integration Of Poultry Cattle Program In
Banyuwangi)*

SKRIPSI

Oleh

**Raditya Dandy Handana
NIM 070910201112**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2014**

SKRIPSI INI TIDAK BOLEH DIKUTIP



**TRANSPARANSI IMPLEMENTASI PROGRAM INTEGRASI TERNAK
UNGGAS DI KABUPATEN BANYUWANGI**

*(The Transparency Implementation Of Integration Of Poultry Cattle Program In
Banyuwangi)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Studi Ilmu Administrasi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara

Oleh

Raditya Dandy Handana
NIM 070910201112

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2014**

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, saya persembahkan Skripsi ini untuk orang-orang yang telah berusaha keras mengantarkan saya menjadi manusia yang lebih berarti:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Benny Handarwanto dan Ibu Ririn Handayani, terima kasih yang tidak terhingga atas doa yang tiada henti serta segala hal yang tidak dapat terbalas dan terungkapkan.
2. Kedua adik saya tersayang Viditya Indah Handiyastuti dan Revita Dripza Handriasari yang selalu ada untukku. Semoga kita dapat selalu membanggakan orang tua kita.
3. Kerabat, sahabat dan semua teman-teman, yang telah banyak memberikan makna yang indah dari kebersamaan ini.
4. Guru-guruku dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.
5. Almamater yang kubanggakan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember sebagai tempat menuntut ilmu.

MOTTO

Orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan hal, yaitu: Kepercayaan, cinta, dan rasa hormat

(Ali bin Ali Thalib)

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh

(Muhammad Ali)

Jangan pernah menyerah, karena di dalam hidup ini tidak ada yang benar-benar berakhir.

(Gon / Hunter X Hunter)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raditya Dandy Handana

NIM : 070910201112

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Transparansi Implementasi Program Integrasi Ternak Unggas di Kabupaten Banyuwangi” benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Desember 2014
Yang menyatakan,

Raditya Dandy Handana
NIM 070910201112

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Transparansi Implementasi Program Integrasi Ternak Unggas di Kabupaten Banyuwangi” telah diuji dan disahkan oleh pada:

Hari, tanggal : Senin, 15 Desember 2014

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Anwar, M.Si
NIP.196306061988021001

M. Hadi Makmur, S.Sos, M.Si
NIP. 197410072000121001

Anggota Penguji

1. Hermanto Rohman, S.Sos, MPA ()
NIP. 197903032005011001

2. Drs. Supranoto, M.Si ()
NIP. 196102131988021001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A

NIP. 195207271981031003

SKRIPSI

**TRANSPARANSI IMPLEMENTASI PROGRAM INTEGRASI TERNAK
UNGGAS DI KABUPATEN BANYUWANGI**

*(The Transparency Implementation Of Integration Of Poultry Cattle Program In
Banyuwangi)*

Oleh

Raditya Dandy Handana
NIM 070910201112

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. A. Kholiq Azhari, MSi
Dosen Pembimbing Anggota : M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP

RINGKASAN

Transparansi Implementasi Program Integrasi Ternak Unggas Di Kabupaten Banyuwangi; Raditya Dandy Handana; 2014: 78 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara; Fakultas Ilmu Sosial dan Politik; Universitas Jember.

Transparansi publik merupakan indikator yang sangat penting dalam pembangunan tata pemerintahan yang baik. Mengingat bahwa sebuah pemerintahan yang baik dan demokratis mensyaratkan institusi kelembagaan pemerintah yang transparan dan efektif untuk melayani kebutuhan kliennya-publik

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi. Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang berangkat dari inkuiri naturalistik yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari prosedur perhitungan secara statistik. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive* dan *Snowball Sampling*. Untuk tahap pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan reduksi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari beragam indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi pengelolaan anggaran meliputi. Publikasi kebijakan publik, Informasi yang disajikan, Penanganan keluhan, dan Pertemuan masyarakat. Diperoleh hasil berdasarkan bahwa Publikasi kebijakan Publik pada program integrasi ternak unggas pada Dinas Peternakan Kabupaten Bayuwangi terdapat dua bentuk yaitu papan informasi yang terdapat di dinas dan petugas teknis. Tersedia informasi bagi masyarakat secara umum mengenai program integrasi ternak unggas. Hal ini terlihat dari kemudahan penulis dalam mendapatkan informasi program, baik mengenai apa itu program integrasi ternak unggas, apa saja kegiatan program, sampai pengelolaan anggaran dari program tersebut. Penangan keluhan erat kaitannya dengan pelayanan yang diberikan oleh dinas kepada msyarakat. Tidak terdapat prosedur pelayanan yang tetap namun pihak dinas telah menyiapkan kotak saran dan serta no telepon yang bisa dihubungi utnuk menyampaikan keluhan kepada dinas. Pertemuan dengan masyarakat kerap kali dilakukan untuk secara sosialisasi dan pembahasan teknis mengenai program integrasi.

Terdapat banyak pihak yang terlibat seperti kepala desa beserta bawahannya, kelompok ternak unggas.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Transparansi Implementasi Program Integrasi Ternak Unggas Di Kabupaten Banyuwangi. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Progam Studi Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, MM, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si, selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu serta memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
5. M. Hadi Makmur, S. Sos, M. AP, selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini menjadi lebih baik;
6. Drs. Boedijono, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dari awal masuk kuliah hingga saat ini terimakasih banyak;
7. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna menguji sehingga menyempurnakan skripsi ini;
8. Ir. Heru Santoso selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi, drh. Benny Handarwanto selaku Sekretaris Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi, drh. Nanang Sugiharto selaku Kepala Bidang Kelembagaan Dan Budidaya Ternak Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi, Moh. Rustam Dwi Atmojo, S.Pt selaku

Kasi Budidaya Dan Teknologi Terapan, Dedi Herdianto selaku petugas teknis Dinas Peternakan untuk wilayah Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, Usnatun Sulasiatin selaku Kepala Desa Rejoagung beserta staff, Ali Muktar selaku Ketua Kelompok Blambangan Makmur beserta pengurus, Ir. Suhartono selaku Ketua Kelompok Prabu Blambangan beserta pengurus.

9. Seluruh Dosen yang terhormat beserta seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
10. Terimakasih kepada kedua orang tua saya tercinta drh. Benny Handarwanto dan Ririn Handayani yang selalu memberi nasehat, semangat, dan doa yang tidak terputus;
11. Adik-adik saya tersayang Viditya Indah Handiyastuti, S.Sos serta Revita Dripza Handriasari, S.Sos terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini;
12. Seluruh teman-teman AN 2007 yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis. Terima kasih banyak telah memberikan semangat dan doa;
13. Seluruh Kerabat, sahabat, teman, Dodik Hermawan; Yoegus Kurniawan, ATT-V; Fitri Ayu Nassahro, amd.keb; *All B.I.S.O.V Member*; *All BYONIC And B.I.S.A*; yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua dukungan yang diberikan.
14. *All Mythologian* Violita Kurnia Ekawati, ST; Roytama Januar, ST, MBA; Vonny Natalia, SE; serta semua *Mythologian* yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua dukungan yang diberikan.
15. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, Desember 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Konsep Dasar	8
2.2 Konsep Pemerintahan	9
2.3 Konsep Good Governance	10
2.3.1 Pengertian Good Governance	10
2.3.2 Prinsip-Prinsip Good Governance	11
2.3.3 Aktor-aktor Good Governance	13
2.3.4 Kendala Mewujudkan Good Governance	14
2.4 Konsep Transparansi	15
2.4.1 Pengertian Transparansi	15
2.4.2 Indikator Transparansi	16
2.4.3 Mekanisme Transparansi	17

2.4.4	Alat Ukur Transparansi	18
2.5	Konsep Implementasi	19
2.5.1	Pengertian Implementasi	19
2.5.2	Implementasi Program	20
2.6	Program Integrasi Ternak Unggas	21
2.6.1	Latar Belakang	21
2.6.2	Tujuan	23
2.6.3	Sasaran	23
2.6.4	Keluaran	23
2.6.5	Prinsip Pelaksanaan.....	23
2.6.6	Pelaksana.....	24
2.6.7	Pemanfaatan Dana.....	26
2.6.8	Tahap Pelaksanaan.....	28
2.6.9	Indikator Keberhasilan	29
2.6.10	Pembinaan dan Pendampingan.....	30
2.6.11	Pemantauan dan Pelaporan.....	30
2.7	Tinjauan Penelitian Terdahulu	31
BAB 3.	METODE PENELITIAN.....	33
3.1	Tipe Penelitian	34
3.2	Lokasi Penelitian.....	34
3.3	Fokus Penelitian.....	35
3.4	Penentuan Informan.....	35
3.5	Sumber Data.....	36
3.6	Tahap Pengumpulan Data	36
3.7	Tahap Pemeriksaan Keabsahan Data.....	38
3.8	Tahap Analisis Data	38
BAB 4.	HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.1.1	Profil Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi	41
4.1.2	Sumber Daya SKPD.....	52

4.1.3 Visi dan Misi.....	57
4.1.4 Profil Kelompok.....	59
4.2 Transparansi Pengelolaan Anggaran pada Program Integrasi	
Ternak Unggas di Kabupaten Banyuwangi	59
4.2.1 Publikasi kebijakan publik	62
4.2.2 Informasi yang disajikan.....	68
4.2.3 Penangan keluhan.....	71
4.2.4 Pertemuan dengan masyarakat	73
BAB 5. PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Populasi Ternak Unggas Tahun 2013.....	5
Tabel 2.1 Indikator Prinsip Transparansi	17
Tabel 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu	32
Tabel 4.1 Daftar Kepegawaian Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi	52
Tabel 4.2 Struktur Kepengurusan Kelompok Blambangan Makmur.....	59
Tabel 4.3 Rincian Pengelolaan Anggaran Program	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Miles Dan Huberman.....	40
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian Dari Lembaga Penelitian Universitas Jember.
2. Surat Ijin Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyuwangi.
3. Surat Tanda Telah Melakukan Penelitian Dari Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi.
4. Pedoman Wawancara.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transparansi merupakan topik yang klasik, namun tetap saja menarik untuk diteliti karena sangat menentukan berlangsungnya suatu organisasi. Ini disebabkan karena istilah transparansi menjadi salah unsur yang sangat penting dalam suatu pemerintahan yang baik, artinya bahwa suatu pemerintahan dapat dikatakan baik kalau seluruh sistem yang dijadikan sebagai tolok ukur kepemimpinannya memasukkan unsur transparansi dalam setiap kebijakannya. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerntahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Transparansi publik merupakan indikator yang sangat penting dalam pembangunan tata pemerintahan yang baik. Mengingat bahwa sebuah pemerintahan yang baik dan demokratis mensyaratkan institusi kelembagaan pemerintah yang transparan dan efektif untuk melayani kebutuhan kliennya-publik (Dwiyanto, 2005). Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi. Ketika suatu instansi memiliki transparansi yang baik, maka segala bentuk kecurangan dapat langsung diketahui karena adanya transparansi dari pihak instansi. Transparansi diperlukan agar baik pegawai di instansi, maupun masyarakat di luar dapat mengerti mengenai kondisi dari instansi tersebut, apalagi jika menyangkut masalah keuangan yang merupakan hal yang sangat sensitif. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat turut menilai dan mengkritisi apabila terjadi kecurangan atau hal yang dianggap tidak wajar. Hal itu dapat menjadi tindakan preventif

karena pelaku kecurangan akan takut menghadapi resiko yang ada, dan juga bisa menjadi tindakan represif ketika kecurangan telah terdeteksi dengan adanya transparansi dari pihak instansi

Keterbukaan akses informasi masyarakat disini menjadi penting agar masyarakat dapat mengawal proses pelaksanaan penggunaan anggaran sehingga masyarakat dapat memastikan apakah alokasi anggaran yang telah dibelanjakan benar-benar dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengedepanan aspek transparansi dalam pengelolaan pemerintahan, maka publik dapat mengetahui informasi berbagai hal berkaitan dengan kebijakan publik. Informasi mengenai kebijakan pemerintah ini terkait dengan berbagai hal seperti motif tindakan dari birokrasi pemerintahan, bentuk tindakan serta waktu pelaksanaan dan cara tindakan tersebut dilaksanakan oleh birokrasi pemerintahan (Fukuyama, 2005).

Tujuan dari transparansi adalah untuk menciptakan; 1) Informasi terbuka luas untuk masyarakat luas (sebagai data pemerintahan dan pembangunan ekonomi) 2) untuk membentuk aturan-aturan, regulasi dan kebijakan pemerintahan bagi publik secara jelas dan terbuka. Aturan dan prosedur yang transparan mencegah aparatur pemerintah dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan dengan ketersediaan informasi yang akurat dan memiliki interpretasi yang jelas. Perlunya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan lokal didasari oleh semangat otonomi daerah yang berpijak pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah seharusnya perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.

Di Kabupaten Banyuwangi penerapan *good governance* dihadapkan pada berbagai kendala seperti masih banyaknya praktik penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang diliputi oleh berbagai tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah (www.infokorupsi.com). Permasalahan yang sering muncul dalam transparansi publik pada hampir semua

pemerintahan lokal diantaranya adalah masalah pengadaan barang, mark up anggaran, tender sering dinilai tidak transparan, syarat dengan KKN, tidak efektif dan efisien (www.jaringnews.com). Kondisi itulah yang melatarbelakangi, pentingnya melakukan refleksi terhadap apa yang telah diupayakan selama ini, salah satunya yang perlu dilakukan evaluasi adalah program pemberdayaan masyarakat melalui program integrasi ternak unggas di Kabupaten Banyuwangi.

Program integrasi ternak unggas adalah program yang berasal dari Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jendral Peternakan yang pendanaannya bersumber dari APBN ini selanjutnya di terima oleh Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi selaku wakil di daerah dengan anggaran mencapai 177 juta. Program ini langsung diberikan oleh pusat kepada dinas, sehingga tidak ada pengawasan dari daerah. Dasar pelaksanaannya sendiri , pihak dinas mengacu pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) No: 018.06.4.051156/2013 dan petunjuk teknis. Bantuan pemberdayaan untuk masyarakat ini diberikan kepada kelompok melalui seleksi yang ketat oleh Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi. Terdapat 60 kelompok peternak unggas di Kabupaten Banyuwangi dengan rincian itik 36 kelompok dan ayam 34 kelompok. Dan dari 34 kelompok tersebut hanya ada 2 kelompok yang mengajukan program yang pada akhirnya keluarlah Kelompok Blambangan Makmur di Desa Rejoagung Kecamatan Srono sebagai penerima bantuan tersebut. Anggaran dari kegiatan integrasi ternak unggas ini dialokasikan untuk biaya operasional dan belanja barang yang meliputi pengadaan unggas (ayam), pakan awal, bibit jagung, pupuk, mesin perontok dan penghalus jagung, termasuk didalamnya adalah biaya pelatihan dan studi banding. Permasalahan yang muncul dari kalangan kelompok yang mendapatkan bantuan unggas tersebut dinilai kurang transparan, dugaan ini sedikit beralasan mengingat informasi anggaran yang diberikan kepada kelompok terbatas pada persoalan tidak mengetahui secara komprehensif persoalan detail mengenai penggunaan anggaran, sedangkan permasalahan yang muncul dari kelompok lain yaitu bagaimana mekanisme penentuan kelompok penerima bantuan oleh pihak Dinas Peternakan. Akses informasi berkaitan dengan penggunaan anggaran masih sebatas pada kelompok sementara masyarakat lain tidak bisa mendapatkan informasi tersebut. Masyarakat tidak mengetahui dan sedikit

mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi. Hal ini terbukti dengan tidak adanya papan informasi mengenai program tersebut sebagai informasi bagi masyarakat diluar kelompok untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan penggunaan anggaran pada program integrasi tersebut. Realitas ini sedikit menimbulkan keresahan dan kecurigaan yang kuat dari kalangan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan berkaitan dengan transparansi dalam penggunaan anggaran pada program integrasi ternak unggas.

Pemilihan program di bidang peternakan bukan tanpa alasan, pasalnya usaha peternakan merupakan bidang yang potensial untuk dikembangkan dan sesuai dengan program pemberdayaan masyarakat yang sedang dilaksanakan pemerintah. Dengan dukungan kondisi geografis dan kultur sosial ekonomi serta potensi sumber daya yang sangat mendukung kelangsungan usaha peternakan maka nantinya apabila dikembangkan secara maksimal akan meningkatkan taraf hidup dan memberikan kontribusi yang nyata terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi rakyat, kegiatan di bidang peternakan masih menjanjikan untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pendapatan peternak. Dijelaskan dalam Buku Pintar Penyuluh Peternakan (1993), usaha peternakan memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

1. Menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
2. Secara langsung meningkatkan pendapatan dan melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Memperluas dan menciptakan lapangan kerja.

Tabel 1.1 data populasi ternak unggas di Kabupaten Banyuwangi

No	Jenis Unggas	Jumlah
1	Ayam Buras	1.290.229
2	Ayam Ras Petelur	599.000
3	Ayam Ras Pedaging	449.875
4	Itik	253.716
5	Entog	25.040

Sumber: Data Populasi Ternak Unggas, Tribulan IV tahun 2013. Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi.

Menurut tabel 1.1 jelas sekali bahwa potensi dari peternakan unggas yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi sangatlah tinggi. Hal ini dikarenakan unggas merupakan hewan yang mudah ditenakkan dan tidak memerlukan lahan yang luas untuk pengembangbiakkannya.

Bertitik tolak dari uraian tersebut maka peneliti ingin mengkaji lebih jauh mengenai transparansi di Dinas Peternakan dengan judul **“Transparansi Implementasi Program Integrasi Ternak Unggas di Kabupaten Banyuwangi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Setiap penelitian berangkat dari suatu masalah, masalah ini mendorong manusia untuk segera memecahkannya, maka penelitian merupakan salah satu cara yang dipakai untuk memecahkan masalah tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Emory (Sugiyono, 2010:32) bahwa, “Baik penelitian murni maupun terapan, semuanya berangkat dari masalah, hanya untuk penelitian terapan, hasilnya langsung dapat digunakan untuk membuat keputusan”. Suatu masalah hendaknya dirumuskan dengan baik, sebab rumusan masalah memuat latar belakang suatu masalah yang akan di teliti.

Masalah itu sendiri menurut Surakhmat (1990:50) didefinisikan sebagai berikut: “Masalah adalah setiap kesulitan yang mengharapakan manusia untuk

memecahkannya. Masalah harus dirasakan sebagai rintangan yang harus dilalui dengan jalan mengatasi apabila ingin berjalan terus”.

Jadi setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari suatu masalah, walaupun tidak mudah memilih suatu masalah. Stonner (Sugiyono, 2010:32) menyatakan, “Masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan, dan kompetisi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang peneliti kemukakan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah transparansi implementasi program integrasi ternak unggas di Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai tujuan, sebab apabila tidak ada tujuan yang jelas berarti penelitian tersebut tidak ada manfaatnya. Dengan adanya tujuan, maka suatu penelitian akan dapat diketahui kearah mana penelitian tersebut akan dibawa. Tujuan penelitian merupakan jawaban dari perumusan masalah yang akan diteliti apabila menggunakan pertanyaan atau ingin menguji apabila penelitian menggunakan hipotesis.

Arikunto (2000:49) menyatakan, “Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai, dilihat dari isinya sesuatu yang dicapai merupakan tujuan penelitian yang sama dengan jawaban problematika penelitian yang berbeda rumusannya”.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Mendeskripsikan transparansi implementasi program integrasi ternak unggas di Kabupaten Banyuwangi

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memiliki kegunaan ilmiah sebagai bahan referensi bagi peneliti lain. Hasil ini diharapkan dapat berguna bagi:

a Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan penulis dapat mengetahui dan memahami mengenai transparansi. Sehingga hal ini bisa dijadikan bekal bagi penulis ketika kembali ke masyarakat.

b Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ekonomi pada khususnya terutama mengenai transparansi publik.

c Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan saran bagi pemerintah setempat mengupayakan transparansi public yang berkaitan dengan program bantuan untuk pemberdayaan masyarakat agar tepat dan sesuai dengan yang dianggarkan.

d Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi kritis kepada masyarakat terkait dengan transparansi publik yang berkaitan dengan kesesuaian program bantuan tersebut dengan dianggarkan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar

Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti menggunakan istilah yang khusus untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak ditelitinya. Konsep ini dapat menyederhanakan sebuah pemikiran dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang saling berkaitan. Konsep disini masih bersifat abstrak dan banyak digunakan dalam penelitian-penelitian sosial. Konsep sering digunakan untuk menggambarkan suatu ide abstrak secara objektif maupun subjektif yang jelas batasnya dalam fenomena yang akan diteliti. Melalui konsep peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian yang saling berkaitan satu sama lain. Yang bertujuan menyederhanakan suatu pemikiran dengan sejumlah fenomena.

Pengertian teori menurut Singarimbun (1989:87) adalah “Serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan proporsi untuk merangkai suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.

Jadi, konsep merupakan definisi singkat dari suatu gejala yang akan diteliti yang dapat menghubungkan dunia observasi dan dunia teori atau antara abstraksi dan realita. Sedangkan penelitian ilmiah diperlukan suatu pedoman yaitu konsepsi dasar. Konsepsi dasar merupakan suatu dasar landasan teori yang akan dipakai untuk menentukan langkah-langkah penelitian.

Pengertian Konsep menurut Singarimbun dan S. Effendi (1995:33) adalah “Istilah dan definisi yang akan digunakan untuk menggambarkan secara abstrak: kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang akan menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Melalui konsep, peneliti diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (*events*) yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

Konsep yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Konsep Pemerintahan
2. Konsep *Good Governance*
3. Konsep Transparansi
4. Konsep Implementasi

2.2 Konsep Pemerintahan

Pemerintahan dan pemerintah mempunyai arti sempit dan luas, Pemerintah dalam arti luas adalah segala tugas dan kewenangan negara, yang kalau mengikuti pembidangan menurut Montesquieu, Pemerintah dalam arti luas meliputi bidang eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit menunjukkan kepada seluruh aparat atau perlengkapan Negara yang menjalankan tugas dan kewenangan dibidang eksekutif saja. Inu Kencana Syafii (1994 : 11), memberikan pengertian sebagai berikut :

- a. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh
- b. Pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan pemerintah
- c. Pemerintah berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dri badan yang memerintah tersebut.

Secara Etimologis, kata Pemerintahan berasal dri kata "perintah" yang kemudian mendapat himbauan sebagai berikut :

- a. Mendapat awalan "pe" menjadi kata "perintah" berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus negara.
- b. Mendapat akhiran "an" menjadi kata "pemerintahan" berarti perihal, cara atau perbuatan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Didalam kata dasar "perintah" paling sedikit ada empat (4) unsur penting yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut :

- a. Ada dua pihak yang memerintah disebut pemerintah dan pihak diperintah yang disebut rakyat.

- b. Pihak yang memerintah yang memiliki wewenang dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
- c. Hak diperintah memiliki kekuasaan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
- d. Antara pihak yang memerintah dan diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal.

Menurut Mac Iver dalam Inu Kencana Syafii (2006:6) mengatakan bahwa maksudnya pemerintah itu sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai Pemerintah dan Pemerintahan maka perlu dilakukan penghayatan yang lebih mendalam. Dalam kepustakaan Inggris dijumpai perkataan “government” yang sering diartikan sebagai “Pemerintah” ataupun “Pemerintahan. Bayu Suryaningrat (2007:11) istilah “government” yang diturunkan dari kata kerja “to govern” artinya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan wewenang pemerintahan
- b. Cara atau sistem memerintah
- c. Fungsi atau kekuasaan untuk memerintah
- d. Wilayah atau Negara yang diperintah
- e. Badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu Negara.

2.3 Konsep *Good Governance*

2.3.1 Pengertian *Good Governance*

Pengertian *good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *Good governance* dapat tercapai apabila beberapa hal dibawah ini dipedomani dalam pengelolaan APBD. Selanjutnya Mardiasmo (2006) mengemukakan elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi, akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengawasan.

Konsep *Good Governance*, *Good Financial Governance* merupakan konsep baru yang di adopsi dari luar diperkenalkan di Indonesia oleh lembaga-lembaga donor

World Bank, *Asian Development Bank* (ADB) dan United Nation Development Program (UNDP). *Good Governance* sebagai suatu kesuksesan pemerintah dalam mengelola keuangan untuk pelayanan umum yang baik.

World Bank dalam Maryono, Warella, Kismartini (2007) mengusung tiga indikator yang perlu diperhatikan dalam good governance yaitu : (1) bentuk rejim politik, (2) proses dimana kekuasaan digunakan dalam manajemen-manajemen sumber daya social dan ekonomi bagi kepentingan pembangunan, (3) kemampuan pemerintah untuk mendesain, memformulasikan, melaksanakan kebijakan, dan melaksanakan fungsi-fungsinya.

ADB mengartikulasikan empat elemen penting dari *good governance* yaitu: (1) akuntabilitas, (2) partisipasi, (3) terprediksi, (4) transparansi. UNDP menyebutkan enam indikator kesuksesan *good governance* yaitu: (1) mengikut sertakan semua, (2) transparan dan bertanggung jawab, (3) efektif dan adil (4) menjamin adanya supremasi hukum, (5) menjamin bahwa priortas-prioritas politik, sosial ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, (6) memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Saragih (2003) dalam Maryono, Warella, Kismartini (2007) mengatakan terdapat lima prinsip dasar dalam mengelola keuangan publik yaitu : (1) transparansi, (2) efisisen, (3) efektif, (4) akuntabilitas, (5) partisipasi. Karakteristik *Good Governace* menurut UNDP dalam Mardiasmo (2006) (1) *participation*, (2) *rule of law*, (3) *transparency*, (4) *responsiveness*, (5) *consensus orientation*, (6) *equity*, (7) *efficiency and effectiveness*, (8) *Accountability*, (9) *strategic vision*.

2.3.2 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Prinsip mengandung pengertian "asas" (kebenaran yang menjadi pokok dasr berpikir dan bertindak, dan sebagainya). Secara harafiah, prinsip dapat diartikan sebagai dasar yang menjadi pedoman yang dijunjung tinggi oleh seseorang atau kelompok karena diyakini kebenarannya. Dalam kaitannya dengan judul skripsi ini, maka faktor

yang ditekankan disini adalah bagaimana suatu "Prinsip" dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu kebenaran umum bukan sekedar mengetahui atau memahami saja hakikat dari pada prinsip itu sendiri. Selain itu juga berbicara mengenai bagaimana suatu prinsip diterapkan secara seimbang dan selaras sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan ketimpangan (*overlapping*) dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Lembaga Administrasi Negara memberikan pengertian *Good governance* yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari :

- a. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
- b. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- d. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
- e. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung
- f. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

- g. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat

2.3.3 Aktor-aktor *Good Governance*

Aktor-aktor *good governance* menurut Sedarmayanti (2009: 280), antara lain:

- a. Negara/pemerintah: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari. Dalam kaitannya dengan bidang pendidikan, pemerintah dan dinas-dinas yang berkaitan seperti dinas pendidikan. Negara sebagai salah satu unsur *governance*, di dalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sektor publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari.
- b. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal. Dalam bidang pendidikan, sektor swasta meliputi yayasan-yayasan yang mengelola sekolah swasta.
- c. Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Dalam bidang pendidikan ada yang dinamakan Dewan Pendidikan yang merupakan lembaga *independent* yang memiliki posisi sejajar dengan Bupati/ Walikota dan DPRD.

Good governance memungkinkan adanya kesejajaran peran antara ketiga aktor di atas. Sebagaimana dalam pengembangan kapasitas *good governance*, ada yang disebut dengan perubahan dalam distribusi kewenangan yaitu telah terjadi distribusi kewenangan yang tadinya menumpuk di pusat untuk didesentralisasikan kepada daerah,

masyarakat, asosiasi dan berbagai kelembagaan yang ada di masyarakat. Artinya saat ini pemerintah bukanlah satu-satunya aktor dalam pengambilan keputusan, masyarakat dan juga pihak swasta pun berkesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

2.3.4 Kendala Mewujudkan *Good Governance*

Upaya perbaikan sistem birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas dalam mencari solusi perbaikan. Demikian pula masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktik KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan. Banyaknya permasalahan birokrasi tersebut belum sepenuhnya teratasi, baik dari sisi internal maupun eksternal (Sedarmayanti, 2009: 310-311). Dari sisi internal, faktor demokrasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak tersebut terkait dengan makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, meningkatnya tuntutan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerja publik serta taat hukum. Secara khusus dari sisi internal birokrasi, berbagai permasalahan masih banyak yang dihadapi, antara lain pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan, dan banyaknya praktik KKN. Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi (*e-government*) merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. Hal tersebut terkait dengan makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat (Sedarmayanti, 2009: 310-311).

Selain itu, problem demokrasi dari segi lembaga dan perilaku individu masih muncul. Rakyat masih belum merasa terwakili oleh keberadaan wakilnya di DPR(D) karena partisipasinya hanya pada saat pemilu, setelah itu rakyat ditinggal dalam proses pengambilan kebijakan. Rendahnya partisipasi dalam masyarakat mengurangi tingkat

legitimasi pemerintah sehingga munculnya pemerintahan yang kuat ditingkat lokal maupun pusat masih dalam cita-cita (Nugroho, 2001 dalam Sedarmayanti, 2009: 311).

2.4 Konsep Transparansi

2.4.1 Pengertian Transparansi

Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Mardiasmo (2006). Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan dipantau.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri (2002), menyebutkan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut *Transparency International*, undang-undang *Freedom of Information* (FOI) bukan hanya mengatur tentang hak publik untuk mengakses informasi tetapi juga menekankan pada obligasi pemerintah untuk memfasilitasi akses tersebut. Krina (2003: 19).

Menurut Nico Andrianto (2007:20) Transparansi adalah “Keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.” Menurut Abdul

Hafiz (2000:40) Tanjung Transparansi adalah “Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan .”

Menurut Sopamah dan Mardiasmo (2003) anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria berikut : (1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran, (2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, (3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu (4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat (4) Terdapat system pemberian informasi kepada publik.

Menurut Hadi Sumarsono (2009) Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsip terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Menurut Mursyidi (2009) Transparansi. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan. Dengan demikian dapat dikatakan transparansi merupakan yang tidak terpisah dalam pencapaian pengelolaan keuangan pemerintah dan pemerintahan yang baik.

2.4.2 Indikator Transparansi

Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance* antara lembaga eksekutif dan legislatif. Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling

percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama informasi handal yang berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan, adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah (Sedarmayanti, 2009:289).

Tabel 2.1 Indikator Prinsip Transparansi

Dimensi	No	Indikator
Transparansi	1	Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik.
	2	Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.
	3	Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
	4	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
	5	Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Sumber: Sedarmayanti (2009:22)

2.4.3 Mekanisme Transparansi

Mekanisme transparansi merupakan cara kerja, aturan-aturan, atau pedoman dalam menerapkan transparansi. Secara ringkas, mekanisme transparansi mencakup hal-hal berikut:

- a. Adanya suatu jaminan dalam sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik

- b. Memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik maupun proses-proses didalam sektor publik
- c. Adanya fasilitas pelaporan maupun penyebaran informasi publik (kebijakan atau program kerja) maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani (Krina, 2003).

2.4.4 Alat Ukur Transparansi

Krina (2003: 16-17) menyebutkan beberapa alat-alat ukur transparansi, yaitu :

- a. Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi : *annual reports*, brosur, leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, website, papan pengumuman, koran lokal
- b. Informasi yang disajikan : acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan.
- c. Penanganan keluhan : berita-berita kota di media massa dan lokal, *notice of respon*, limit waktu respon, *opinion pools & survey* tentang isu-isu kebijakan publik, komentar & catatan untuk draft kebijakan & peraturan, *service users surveys*.
- d. Institusi dan organisasi daerah : Bawasda, kantor PMD/BPM, kantor Humas, dinas Kominfo, Forum Lintas Pelaku.
- e. Pertemuan masyarakat
- f. Mimbar rakyat.

Melalui penjelasan Krina diatas dapat disimpulkan bagaimana seharusnya pemerintah daerah memuaskan rasa keingintahuan dari masyarakat tentang jalannya pemerintahan daerah mereka dengan cara mentranparansikan laporan-laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga bagaimana pemerintah daerah dapat mengetahui aspirasi masyarakat dengan menyediakan alat-alat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol berjalannya pemerintah daerah di daerahnya sendiri.

2.5 Konsep Implementasi Program

2.5.1 Pengertian Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah:

“Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” (Webster dalam Wahab, 2004:64)

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Pengertian implementasi menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah:

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2004:65)

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut:

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”. (Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab, 2004:68)

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastiar merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

2.5.2 Implementasi Program

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Jones dalam Arif Rohman (2009: 101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program, yaitu:

1. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

2. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

2.6 Program Integrasi Ternak Unggas

2.6.1 Latar Belakang

Pembangunan peternakan di Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari pembangunan pertanian. Sayangnya, pengembangan sektor pertanian dan peternakan, dalam hal ini ternak unggas lokal secara umum masih sangat memprihatinkan. Produksi daging dan telur sebagai hasil utama peternakan unggas lokal di Indonesia hampir seluruhnya diperoleh dari peternakan skala kecil yang menyebar mengikuti penyebaran penduduk. Dalam jangka panjang, peningkatan permintaan daging dan telur unggas lokal baik di tingkat nasional maupun internasional dan penurunan jumlah produksi daging dan telur unggas di negara importir, serta penghapusan subsidi pada negara-negara eksportir, akan meningkatkan harga daging dan telur unggas di pasar internasional. Secara umum karakteristik permintaan tersebut, menjadikan agribisnis unggas lokal sebagai kegiatan usaha yang cukup prospektif. Unsur penentu dalam keberhasilan teknis dan ekonomis usaha peternakan adalah kemampuan mengintegrasikan faktor breeding feeding-management, sehingga tercapai hasil yang efisien.

Fungsi pakan bagi ternak tidak hanya sebagai sumber energi untuk hidup, tetapi pakan tersebut juga berperan sebagai bahan yang akan diubah bentuknya menjadi daging dan telur, sehingga ketersediaan pakan berkualitas menjadi syarat utama untuk dapat menghasilkan daging dan telur yang berkualitas juga. Pakan yang berkualitas tinggi tentunya akan memberikan tingkat efisien (FCR) dalam penggunaan sumber daya dan pembiayaan usaha, karena kualitas pakan yang baik akan memberikan implikasi positif terhadap aspek produksi dalam budidaya ternak.

Kendala umum dari pengembangan peternakan unggas adalah ketersediaan dan kualitas pakan yang rendah. Cara yang mudah dan praktis untuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan mengimpor bahan pakan. Namun dengan adanya perubahan kebijakan dunia akan pemenuhan sumber energi melalui bio-fuel yang berasal dari jagung atau jenis bahan pakan lain, maka importasi bukan cara yang tepat untuk melakukan efisiensi, sehingga dibutuhkan strategi lain seperti mengaplikasikan pola integrasi budidaya.

Indonesia mempunyai keanekaragaman sumber bahan baku pakan yang luar biasa dan jika dikelola dengan baik maka importasi dapat dikurangi secara signifikan. Sebagai contoh produksi jagung dalam negeri pada tahun 2009 sudah dapat memenuhi 94% kebutuhan bahan pakan unggas ras, karena hanya sekitar 6% saja yang diimpor dari luar negeri seperti dari Amerika, Argentina, Brazil, India atau China.

Sebagian besar usaha sektor pertanian menitikberatkan pada usaha yang menghasilkan satu jenis produk saja (single product) sehingga sangat rentan terhadap resiko kerugian akibat fluktuasi harga jual yang tajam. Jika produsen tetap mengandalkan pada satu jenis produk saja, dan jika harga jual produk tersebut terus menurun, maka akan berdampak negatif bagi produsen, terutama dalam mempertahankan keberlanjutan usahanya. Oleh karenanya, untuk mengurangi ketergantungan itu, diperlukan adanya diversifikasi atau penganekaragaman jenis usaha alternatif yang tepat untuk diintegrasikan dengan usaha pokok tertentu.

Peternak merupakan bagian dari pertanian, bukan merupakan usaha yang parsial tetapi merupakan usaha yang integral yang saling mendukung. Suatu sistem usaha yang komponen-komponennya saling berintegrasikan dan berintegrasi satu dengan lainnya melalui optimalisasi sumberdaya yang ada dan disertai dengan pertimbangan teknis, ekonomi dan sosial budaya yang tepat, maka diharapkan produktivitas usahatani tersebut akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak.

Konsep Integrasi tanaman dengan unggas dilakukan pada usaha budidaya dengan memanfaatkan hasil samping atau limbah agro-industri sebagai pakan yang merupakan solusi dalam rangka mengurangi biaya produksi serta dapat menggali dan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia sehingga peternak unggas yang umumnya skala usahanya kecil sampai menengah mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan pakan ternaknya.

2.6.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan pengembangan integrasi ternak unggas adalah optimalisasi pemanfaatan bahan pakan lokal sehingga peternak mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan pakan ternaknya.

2.6.3 Sasaran

Sasaran dari kegiatan pengembangan integrasi ternak unggas adalah :

- 1) Peningkatan efisiensi pemeliharaan unggas melalui pengurangan biaya produksi dari penggunaan bahan pakan lokal.
- 2) Sebagai usaha untuk mengurai ketergantungan impor bahan pakan unggas melalui peningkatan pemanfaatan hasil samping atau limbah produk pertanian, perkebunan, perikanan atau agro-industri sebagai sumber bahan pakan unggas yang murah.

2.6.4 Keluaran

Keluaran atau output merupakan hasil yang didapat langsung dari kegiatan ini adalah :

- 1) Tumbuhnya kelompok-kelompok peternak unggas yang melaksanakan konsep-konsep integrasi
- 2) Optimalisasi pemanfaatan ketersediaan bahan pakan lokal yang berasal dari hasil pertanian / perkebunan ataupun limbah agro-industri produk pertanian di sekitar lokasi peternakannya.

2.6.5 Prinsip Pelaksanaan

- 1) Kegiatan dilaksanakan oleh kelompok ternak secara terintegrasi dengan pemanfaatan limbah hasil pertanian atau agro-industri dari tanaman pangan (padi, jagung, sereal lainya), tanaman perkebunan (sawit, coklat, kopi), atau integrasi dengan komoditi lainnya disesuaikan dengan potensi pakan lokal setempat.

- 2) Untuk integrasi unggas – sawit, yang kelompoknya berada di dalam lokasi perusahaan perkebunan sawit, pelaksanaannya agar dapat berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan setempat.
- 3) Usaha kelompok unggas adalah usaha budidaya dan atau perbibitan unggas lokal (ayam lokal dan itik).
- 4) Agar dalam pelaksanaannya, seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan ini mematuhi semua peraturan yang terkait dan menghindari praktek KKN.
- 5) Melakukan koordinasi dan sinergitas positif dengan semua pihak terkait di daerah.

2.6.6 Pelaksana

1. Pusat

Direktorat Jendral Peternak dan Kesehatan Hewan, dalam hal ini Direktorat Pakan Ternak selaku penanggung jawab kegiatan, mempunyai tugas :

- 1) Menyusun pedoman pelaksanaan
- 2) Melakukan sosialisasi dengan pihak terkait
- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
- 4) Melakukan pembinaan dan pemantauan

2. Provinsi

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau instansi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi, mempunyai tugas :

- 1) Melakukan koordinasi dengan pihak/instansi terkait di provinsi
- 2) Menyusun petunjuk pelaksanaan (Juklak)
- 3) Membentuk tim teknis
- 4) Menetapkan lokasi dan kelompok penerima, berdasarkan hasil seleksi lokasi dan kelompok (CPCL) oleh tim teknis.
- 5) Melakukan pembinaan dan pendampingan
- 6) Menyusun laporan dan mengirimkannya ke pusat

3. Kabupaten/Kota

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau instansi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota, mempunyai tugas :

- 1) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait di kabupaten/kota.
- 2) Menyusun petunjuk teknis (Juknis)

Juknis berisi antara lain :

 - a. Spesifikasi ternak yang akan dibeli, disesuaikan dengan pola usaha yang akan dilakukan oleh kelompok.
 - b. Jenis dan spesifikasi alat mesin pengolah pakan yang akan dibeli, disesuaikan dengan jenis dan jumlah bahan baku yang ada di lokasi integrasi.
 - c. Pengelolaan administrasi kelompok.
 - d. Petunjuk teknis lainnya (misalnya tentang perkandangan, formulasi pakan, kesehatan hewan, pengelolaan kotoran ternak, dsb).
- 3) Sebagai anggota Tim Teknis, melaksanakan proses identifikasi dan seleksi CPCL, pengawalan dan pendampingan.
- 4) Memfasilitasi pelatihan teknis dan manajemen kelompok bekerjasama dengan petugas lapangan yang menangani fungsi peternak setempat.
- 5) Melakukan monitoring kegiatan
- 6) Menyusun laporan dan mengirimkannya ke provinsi.

4. Kelompok

Kelompok penerima kegiatan adalah kelompok yang telah diidentifikasi dan diseleksi oleh Tim Teknis sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, dan kelompok ini kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan atau Instansi yang melaksanakan fungsi peternakan provinsi, sebagai kelompok penerimaan kegiatan.

Pemilihan kelompok penerima kegiatan agar dapat memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Kelompok peternak yang sudah lama berdiri atau kelompok baru yang mempunyai minat untuk beternak, dapat berupa sub kelompok dari

gapoktan (padi, jagung, dsb), atau sub kelompok dari gapokbun pada perkebunan sawit rakyat/pekebun plasma.

- 2) Jika memungkinkan dapat dipilih kelompok baru yang dibentuk di lokasi perkebunan sawit besar (BUMN atau swasta), namun hal ini perlu koordinasi intensif dengan pihak perkebunan yang bersangkutan.
- 3) Mempunyai potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.
- 4) Lokasi mudah dijangkau.

2.6.7 Pemanfaatan Dana

Dana bantuan yang dialokasikan untuk kegiatan pengembangan integrasi ternak unggas, dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti dibawah ini atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kelompok, untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan:

- 1) Pengadaan/penambahan populasi ayam lokal/itik (40%)

Penggunaan dana minimal 40% untuk pengadaan unggas. Jika pengadaan ayam lokal/itik, ditunjukkan untuk usaha pembibitan, maka untuk menjaga mutu bibit agar diupayakan pemilihan bibit yang memenuhi Persyaratan Teknis Minimal (PTM) atau Standard Nasional Indonesia (SNI) Bibit ayam/itik.

Sedangkan pengadaan ayam lokal/itik yang ditujukan untuk usaha budidaya, maka pemilihan ternak mengacu pada ketentuan pedoman usaha budidaya unggas (ayam lokal/itik) yang dikeluarkan Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- 2) Pengadaan alat dan mesin pengolah pakan (40%)

Dana sebesar maksimal 40% dapat dimanfaatkan untuk pengadaan sarana pengolah pakan. Jenis alat pengolah pakan yang dibeli agar disesuaikan dengan kebutuhan kelompok, dengan mempertimbangkan bahan pakan lokal yang tersedia dan bahan pakan yang akan diolah.

Contoh jenis alat pengolah pakan yang dapat dibeli antara lain:

- a. Alat pemecah (hammer mill)

- b. Alat penepung (disk mill)
- c. Alat pengaduk atau pencampur(mixer)
- d. Alat penunjang produksi pakan lainnya seperti gerobak, kaitan/ganco, sekop dll.

Apabila dana bantuan tersebut tidak mencukupi untuk pembelian alatmesin pengolah pakan sesuai dengan yang dibutuhkan, diharapkan dapat didukung dari dana APBD atau swadaya kelompok.

3) Penyediaan bahan pakan (10%)

Dana sebesar 10% untuk penyediaan bahan pakan unggas, misal dedak, jagung, konsentrat untuk digunakan selama awal pemeliharaan unggas sampai 3 (tiga) bulan sehingga ternak sudah beradaptasi dengan kondisi setempat. Untuk selanjutnya kelompok mengatur dari modal swadaya.

4) Pelatihan pengolah pakan (5%)

Dalam upaya meningkatkan SDM kelompok, maka maksimal 5% dari dan bantuan dipergunakan untuk membiayai kegiatan pelatihan. Jenis pelatihan yang disarankan adalah pelatihan penyusunan formula pakan dari bahan pakan lokal dan pelatihan manajemen penyediaan pakan yang berkualitas dan terjamin kontinuitasnya.

5) Administrasi kelompok (5%)

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan dalam upaya penguatan kelembagaan kelompok, maka dana bantuan sebesar maksimal 5% dipergunakan untuk mendukung administrasi kelompok seperti pembelian alat tulis administrasi kelompok, biaya fotocopy, pembuatan papan nama, penyusunan laporan, buku administrasi atau pencatatan populasi, produksi ternak kelompok dan lain-lain.

Peran kelembagaan kelompok sangat penting yaitu:

- a. Tempat bertemu dan berkomunikasi bagi seluruh anggota untuk meningkatkan wawasan dan bertukar informasi melalui penyuluhan, baik yang dilakukan oleh PPL setempat, petugas lapang Dinas Peternakan atau dari peternak ke peternak lainnya.

- b. Sebagai sarana untuk meningkatkan usaha kelompok kearah yang lebih komersial (diversifikasi usaha), hendaknya pertemuan dilaksanakan secara rutin untuk merencanakan pengembangan usaha dan membahas permasalahan serta mendapatkan solusinya dari pendamping/ Pembina kelompok. Diharapkan juga mempunyai kas kelompok sebagai aset bersama untuk mengembangkan usaha.

2.6.8 Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengembangan Integrasi ternak unggas pada tahun 2013 meliputi :

- 1) Pembentukan Tim Teknis
 - a. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, perlu dibentuk tim teknis oleh Dinas Peternakan atau Instansi yang melaksanakan fungsi peternakan provinsi yang akan bertanggung jawab terhadap kegiatan ini.
 - b. Tim Teknis terdiri dari unsur Dinas Peternakan Provinsi, Dinas Peternakan Kabupaten/Kota, Dinas terkait dengan kegiatan integrasi di kabupaten/kota dan petugas lapangan di lokasi kelompok (misal PPL/KCD/mantri tani/Inseminator/ petugas pakan).
 - c. Tim teknis bertugas dan bertanggung jawab terhadap kegiatan, mulai dari proses identifikasi dan seleksi CPCL, pengawalan kegiatan dan pendamping kelompok.
- 2) Tahapan pelaksanaan Kegiatan
 - a. seleksi kelompok dan lokasi oleh Tim Teknis, hasil seleksi diusulkan ke Dinas Provinsi.
 - b. Tim Teknis melakukan verifikasi kelompok yang telah diusulkan Dinas Kabupaten.
 - c. Penetapan kelompok oleh Dinas provinsi.
 - d. Pelaksanaan kegiatan fisik melalui tender dilakukan oleh Provinsi (satker provinsi) atau Kabupaten (satker kabupaten) dan mengikuti peraturan yang berlaku pada tahun 2013, yaitu meliputi :
 - Pengadaan ternak

- Pengadaan alat mesin pengolah pakan
 - Kegiatan fisik lainnya sesuai dengan RKK/RUK
- e. Pembenahan administrasi kelompok.
- f. Pelaporan
- 3) Tatacara pencairan dana mengikuti peraturan/ketentuan yang berlaku pada tahun 2013.
- 4) Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha kelompok diarahkan pada pendekatan yang saling terkait dan dilakukan secara terpadu dan pengelolaan seluruh usaha sedapat mungkin dilakukan oleh kelompok agar tercapai kemandirian.

2.6.9 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan integrasi ternak unggas pada lokasi kegiatan dilihat dari beberapa aspek, antara lain :

1. Aspek Teknis

- 1) Pemanfaatan bahan pakan lokal yang berasal dari limbah atau hasil samping pertanian/perkebunan, perikanan dan atau olahannya.
- 2) Peningkatan populasi pada kelompok penerima bantuan.
- 3) Peningkatan produktifitas ternak dan tanaman.

2. Aspek Usaha

- 1) Peningkatan kemampuan anggota kelompok dalam pengelolaan usaha, dilihat dari kemampuannya membuat perencanaan, analisa usaha, melakukan usahanya dengan orientasi agribisnis.
- 2) Berkembangnya usaha, dilihat dari skala kepemilikan ternak pada anggota kelompok, perkembangan modal usaha yang dikelola kelompok, adanya diversifikasi usaha.

3. Aspek Kelembagaan

- 1) Peningkatan partisipasi anggota dalam pengelolaan usaha.

- 2) Diterapkannya prinsip-prinsip dasar organisasi, seperti peraturan yang tercantum dalam AD/ART kelompok, struktur organisasi dan uraian tugasnya, mempunyai pencatatan yang baik, dinamika dari usaha dan sekretariat kelompok.
- 3) Berperannya kelompok dalam organisasi pembelajaran (learning organization) bagi anggota dan masyarakat sekitarnya.
- 4) Kemandirian kelompok dengan indikasi tidak ada lagi bantuan pihak lain karena kelompok sudah dapat mengakses sendiri sumberdaya yang dibutuhkannya.

2.6.10 Pembinaan dan Pendampingan

1. Pembinaan dan pendampingan dilaksanakan secara berkelanjutan dan terkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, sampai kelompok dapat melakukan usahanya secara mandiri.
2. Pembinaan dan pendampingan dilakukan untuk menumbuhkan usaha ekonomi produktif dilokasi pedesaan serta meningkatnya produksi dan produktifitas ternak dan tanaman.
3. Ruang lingkup pembinaan dan pendampingan meliputi :
 - 1) Pemanfaatan hasil samping produk tanaman/perkebunan untuk pakan unggas.
 - 2) Pembinaan kepada peternak untuk inovasi teknologi pengolahan pakan sesuai sumberdaya lokal yang tersedia.
 - 3) Pengembangan kelembagaan dan usaha kelompok.

2.6.11 Pemantauan dan Pelaporan

1. Pemantauan
 - 1) Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kelompok dalam pelaksanaan kegiatan. Dinas Peternakan kabupaten/kota dan provinsi agar melakukan pemantauan secara berkala.

- 2) Hasil pemantauan agar dianalisa dan dievaluasi menggunakan indikator yang telah ditetapkan dan dilaporkan ke pusat pada akhir kegiatan.
 - 3) Pusat melakukan pemantauan (tahunan) dan evaluasi pada akhir pelaksanaan program (5 tahun). Hasil evaluasi akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan program selanjutnya.
2. Pelaporan
- 1) Pelaporan sangat diperlukan untuk mengetahui kemajuan kegiatan dan sebagai tolok ukur pusat untuk penilaian dan keberlanjutan kegiatan di provinsi yang bersangkutan.
 - 2) Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan provinsi agar membuat laporan semesteran dan mengirimkannya ke Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - 3) Format laporan dari provinsi merupakan rekapitulasi dari laporan Dinas Peternakan atau Instansi yang melaksanakan fungsi peternakan kabupaten/kota sebagaimana yang dikirim ke provinsi pada bulan Juni dan November 2013.

2.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai tambahan bahan pemikiran dan referensi bagi peneliti.

Tabel 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Uraian	Penelitian terdahulu	Penelitian terdahulu	Penelitian sekarang
1.	Nama	Fery Triatmojo	Ristya Dwi Angraini	Raditya Dandy H.
2.	Judul	Transparansi Anggaran Sektor Kesehatan Daerah	Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran BOS	Transparansi dan pengelolaan anggaran program integrasi ternak Dana unggas
3.	Lokasi	Bandar Lampung	Surabaya	Banyuwangi
4.	Metodologi penelitian	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
5.	Tahun	2010	2013.	2014

Sumber : Data Diolah, 2014

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah ini berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diteliti oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui dan mengamati cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris yang mempunyai kriteria tertentu yaitu Valid. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti.

Dengan demikian metode penelitian adalah cara atau jalan yang harus ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh pemecahan terhadap segala permasalahan sehingga nantinya akan diperoleh data yang objektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pendapat diatas, maka penelitian ini menggunakan metode ilmiah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian.
2. Lokasi Penelitian
3. Fokus Penelitian
4. Penentuan Informan
5. Sumber Data
6. Tahap Pengumpulan Data
7. Tahap Pemeriksaan Keabsahan Data

3.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini metode deskriptif dengan penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2009:11) menjelaskan mengenai tipe deskriptif yaitu:

“Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka yang berasal dari naskah wawancara, catatan, lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya dimana itu semua berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data yang memberikan gambaran penyajian laporan”.

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status variabel atau semua gejala maupun keadaan yang ada pada saat penelitian ini dilakukan secara sistematis dan akurat. Penelitian deskriptif lebih menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan dan kebanyakan tidak dimaksudkan untuk uji hipotesis tertentu. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2009:4) “Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.

Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif, peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Setiap kejadian merupakan sesuatu yang unik, berbeda dengan yang lain, karena perbedaan konteks.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat diadakannya penelitian guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi dan di Desa Rejo Agung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi tempat kelompok tinggal.

3.3 Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Masalah itu sendiri menurut Moleong (2008:93) merupakan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban.

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan kepada bagaimana transparansi implementasi pada program integrasi ternak unggas di Kabupaten Banyuwangi.

3.4 Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan secara bebas, artinya peneliti dapat memilih siapa dan berapa jumlah yang akan dijadikan informan guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh dalam penelitian. Informan adalah seorang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2009:132). Untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam, maka jumlah informan tidak dibatasi terlebih dahulu melainkan dapat berkembang disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, dalam penelitian ini, penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan dari penelitian.

Selain itu peneliti juga menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu informan yang didapatkan melalui rekomendasi informan yang telah ada. Penggunaan teknik *snowball sampling* dilakukan apabila penggunaan *purposive sampling* dianggap kurang memenuhi jawaban akhir penelitian.

Menurut Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono, 2010:400) mengatakan bahwa informan sebagai sumber data sebaiknya dapat memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.

3. Mereka yang mempunyai waktu memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti perlu memberikan informan kunci yang dianggap paling mengetahui dan menguasai secara mendalam masalah atau informasi yang ingin peneliti kaji dan terlibat secara aktif, sehingga mampu memberikan informasi yang rinci.

3.5 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ini unsur yang diteliti adalah nilai dari perubahan-perubahan yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka.

Jenis data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek yang diteliti. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang terkait dengan program.

3.6 Tahap Pengumpulan Data

Data merupakan alat yang digunakan peneliti sebagai keterangan yang dapat digunakan dalam menganalisa suatu masalah. Pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data fakta yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melihat dokumen atau arsip perusahaan yang digunakan untuk memperoleh data-data administrasi yang berkaitan dengan penelitian. Data-data yang diambil antara lain tentang sejarah perusahaan, jumlah karyawan, struktur organisasi, unggas, dan data pendukung lainnya yang disesuaikan dengan obyek penelitian.

c. Observasi.

Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung obyek datanya (Jogiyanto, 2004:89). Observasi dapat berupa observasi yang sederhana dan observasi yang terstruktur. Observasi yang sederhana merupakan observasi yang tidak mempunyai pertanyaan-pertanyaan riset. Sebaliknya observasi terstruktur merupakan observasi yang mempunyai standar yang terstruktur.

d. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan peneliti, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak atau elektronik.

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

3.7 Tahap Pemeriksaan Keabsahan Data

Setelah data yang diperlukan untuk penelitian diperoleh, maka kegiatan selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh tersebut menurut moleong (2009:327) teknik pemeriksaan keabsahan data antara lain:

a. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data, keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian.

b. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan dari pada hal-hal tersebut secara rinci.

c. Triangulasi

Merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

d. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Dilakukan dengan cara mengekpos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.

3.8 Tahap Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan mencari jawaban permasalahan melalui banyak sumber informan sampai jawaban itu jenuh. Peneliti menggunakan metode analisis data milik Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2010:334) yang menyatakan bahwa paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif

karena metode analisis belum dirumuskan dengan baik. Metode Miles dan Huberman membagi proses analisis data kualitatif ke dalam tiga tahapan yaitu: proses reduksi data, proses penyajian data, dan proses penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan terus menerus saat penelitian berlangsung. Data yang didapat saat penelitian digabung, disederhanakan, dipilih pokok data yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan mengabaikan yang tidak perlu. Reduksi data dilakukan agar dapat memberikan informasi dengan gambaran yang jelas, mempermudah peneliti untuk mencari data selanjutnya dengan menentukan tema dan pola data yang disajikan.

2. Penyajian Data

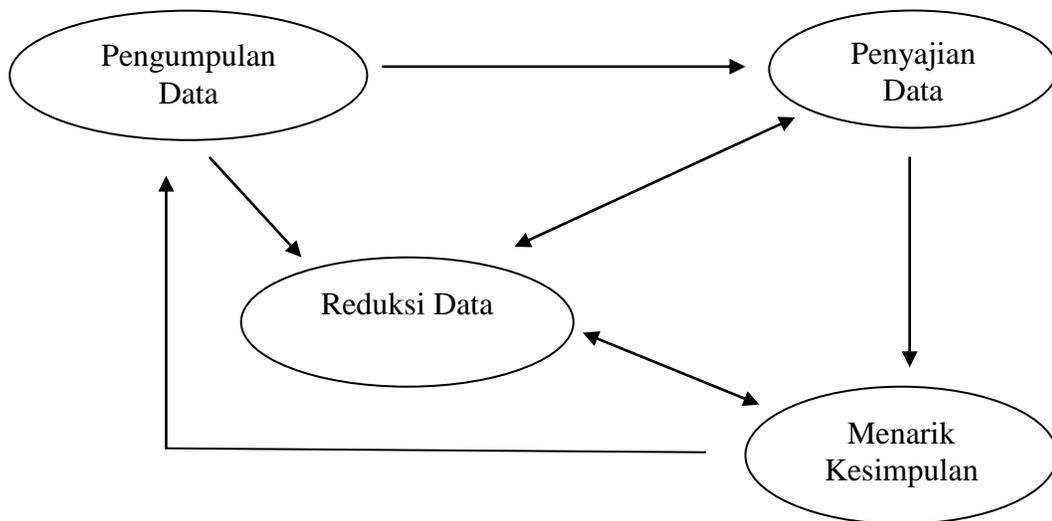
Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa bagan, ulasan singkat yang tersusun rapi dan menghubungkan antar kategori. Penyajian data dibatasi dalam sekumpulan informasi yang dapat ditarik suatu kesimpulannya. Berikut adalah bentuk-bentuk penyajian data yang telah dilakukan peneliti:

- a. Peneliti menyajikan data dalam bentuk ulasan hasil wawancara setiap informan yang kemudian dihubungkan dengan sub-bab yang dibahas.
- b. Untuk menunjang ulasan yang mudah dipahami pembaca, peneliti memberikan ulasan dalam bentuk gambar-gambar dan tabel-tabel dari hasil mereduksi data.

3. Menarik Kesimpulan

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, dalam kesimpulan awal dapat bersifat sementara dan dapat berubah apabila menemukan data yang kuat dalam penelitian kualitatif.

Ketiga teknik analisis data tersebut digambarkan sebagai berikut



Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi

Sejak Jaman Pemerintahan Hindia Belanda urusan kehewananan merupakan salah satu urusan yang menjadi prioritas pemerintahan waktu itu mengingat hewan/ternak merupakan harta/kekayaan yang dimiliki/dipelihara masyarakat bangsa indonesia dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Menyadari akan pentingnya hewan/ternak sebagai kekayaan yang dimiliki bangsa indonesia dan resiko penularan penyakit pada hewan yang bisa menular pada manusia, maka sejak tahun 1841 telah dibentuk semacam Dinas Kehewananan di daerah-daerah, kemudian pada tahun 1905 dibentuklah Jawatan Kehewananan Pusat (Burgelijke Veersenijkundige Dient/BVD).

Staatblad 1912 Nomor 432 dan 435, menyatakan campur tangan pemerintah dalam urusan kehewananan meliputi :

- a. Pemberantasan penyakit hewan menular;
- b. Perbaikan kualitas dan kuantitas peternakan;
- c. Kesehatan/kebersihan (hygiene) veteriner.

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak awal sejarah baru Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana Urusan Kehewananan sebagian besar oleh Pemerintah Pusat didasarkan kepada daerah-daerah otonom (Provinsi dan Kabupaten). Pembagian urusan dan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin dipertegas dengan diaturnya urusan peternakan di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1979 tentang Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, sedangkan di Daerah Tingkat II Kabupaten merupakan Cabang Dinas Peternakan

Daerah Provinsi Tingkat I Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

Cabang Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Kabupaten Banyuwangi dalam perkembangannya mengalami pasang surut, seiring dengan azas desentralisasi, dekosentrasi dan otonomi daerah. Pemberian sebagian urusan kewenangan terhadap daerah yang seluas-luasnya merupakan momentum terbentuknya Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi yang didasari adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 20 Tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Tingkat II Banyuwangi.

Dalam perkembangan selanjutnya di era reformasi, kebijakan-kebijakan di daerah banyak dipengaruhi oleh unsur pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati Kepala Daerah dan DPRD, maka urusan peternakan juga tidak lepas dari kebijakan-kebijakan tersebut, sehingga di tahun 2009 Dinas Peternakan yang semula berdiri sendiri menjadi unsur SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) digabung kedalam satu lingkup dinas yakni Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan. Kemudian di era Bupati H. Abdullah Azwar Anas, Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi dibentuk kembali menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berdiri sendiri dengan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi.

Struktur organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Peternakan mempunyai tugas antara lain:
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang peternakan.
 - b. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang peternakan.
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang peternakan.

- d. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Peternakan.
 - e. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Peternakan.
 - f. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan jabatan fungsional di lingkungan Dinas Peternakan.
 - g. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku.
 - h. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - j. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.. Sekretariat membawahi :
- a. Sub bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub bagian Keuangan dan perlengkapan
 - c. Sub Bagian penyusunan program

Fungsi dari Sekretariat adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas.
- c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait.

- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas dari Sekretariat adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas.
- b. Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
- c. Mengkoordinasi pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas.
- d. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait.
- e. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub bagian Administrasi dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sesuai dengan Rencana Kerja Dinas.
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian.
- c. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- d. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
- e. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan Rencana Kerja Dinas.
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan inventaris.
- c. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan.
- d. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Dinas.
- e. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Penyusunan program, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan program sesuai dengan Rencana Kerja Dinas
 - b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan dan program pengembangan kegiatan Dinas.
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Dinas.
 - d. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
 - e. Menilai hasilkerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
3. Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang Kesehatan Hewan.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan membawahi:

- a. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Hewan.

b. Seksi Pengobatan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan memiliki fungsi antara lain:

- a. Pelaksanaan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan.
- b. Pelaksanaan penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan.
- c. Pelaksanaan pelayanan penanganan kasus-kasus penyakit hewan.
- d. Pelaksanaan peramalan wabah dan pemetaan kasus penyakit hewan.

Kepala seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Hewan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Hewan sesuai dengan rencana kerja Dinas.
- b. Melaksanakan pengamatan (surveillance) penyakit hewan menular beserta aspek-aspek epidemiologinya.
- c. Menyusun konsep tindak lanjut penanggulangan wabah dalam rangka mengatasi penyebaran penyakit hewan menular.
- d. Melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan laboratorium kesehatan di daerah.
- e. Membantu pelaksanaan tindak karantina.
- f. Menetapkan wilayah dan lokasi vaksinasi pada daerah tertular, terancam, waspada, bebas dan lain-lain.
- g. Melaksanakan vaksinasi.
- h. Melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Ante Mortem terhadap semua ternak yang akan dipotong.
- i. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan hewan besar betina bertanduk yang akan dipotong.
- j. Melaksanakan pengawasan lalu lintas hewan.

- k. Memberikan surat keterangan asal dan kesehatan hewan yang akan dikeluarkan dari Kabupaten ke daerah lainnya dalam wilayah satu propinsi.

Kepala Seksi Pengobatan Dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana seksi Pengobatan dan Pemberantasan Penyakit Hewan sesuai dengan rencana kerja Dinas.
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan.
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan penyelenggaraan pengobatan hewan sakit.
 - d. Membantu pengaturan praktek dokter hewan dan atau badan hukum yang melaksanakan usaha pelayanan pengobatan hewan.
 - e. Melakukan penutupan wilayah apabila berjangkit wabah.
 - f. Melaksanakan pemberantasan penyakit di wilayah.
 - g. Mengadakan pelaporan tentang pelaksanaan penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan.
 - h. Menyusun konsep Peraturan tentang perizinan dan pengelolaan pembibitan anjing, kucing dan hewan piaraan lainnya bersama unit kerja terkait lainnya.
4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Kepala Bidang kesehatan masyarakat veteriner membawahi:

- a. Seksi Obat dan Kesejahteraan Hewan
- b. Seksi Bahan Asal Hewan

Untuk Melaksanakan tugas, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan Pembinaan kesehatan dan Peredaran bahan asal hewan.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan dan pemantauan terhadap penyakit yang bersifat zoonosis serta pengaruhnya pada kesehatan masyarakat dan lingkungan.

- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap pembuatan, persediaan, peredaran dan pemakaian vaksin, sera dan bahan biologik untuk hewan dan obat hewan.
- d. Pelaksanaan pembinaan terhadap kepentingan kesejahteraan hewan.

Kepala seksi Bahan Asal Hewan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana seksi Bahan Asal Hewan sesuai dengan rencana kerja Dinas.
- b. Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap kegiatan pemeriksaan post mortem terhadap semua hasil pemotongan ternak yang akan beredar.
- c. Melakukan pembinaan dan pemantauan tempat-tempat penjualan daging, telur dan susu.
- d. Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap peredaran dan pengujian produk asal ternak.
- e. Melakukan bimbingan teknis pengolahan, penanganan dan pemeriksaan Daging, telur dan susu.
- f. Melakukan pembinaan dan pemantauan produk pada perusahaan susu, perusahaan unggas dan perusahaan babi.
- g. Melakukan pemeriksaan Hygiene dan sanitasi terhadap Perusahaan Peternakan.
- h. Melaporkan hasil inventarisasi kejadian zoonosis di daerah.
- i. Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap penyakit yang bersifat zoonosis dan pengaruhnya pada kesehatan masyarakat dan lingkungannya.
- j. Memberikan surat keterangan asal dan kesehatan produk ternak dan ikutannya yang akan dikeluarkan dari Kabupaten ke daerah lainnya dalam wilayah satu propinsi.

Kepala Seksi Obat dan Kesejahteraan Hewan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana seksi Obat dan Kesejahteraan Hewan sesuai dengan rencana kerja Dinas.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap peredaran dan pemakaian obat hewan.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan peredaran, persediaan dan pemakaian vaksin, sera dan bahan biologik untuk hewan.

- d. Mengambil contoh (sampel) obat hewan, vaksin dan bahan biologik untuk hewan yang beredar guna keperluan pengujian mutu.
 - e. Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pembuatan dan pemakaian ojuvan yang menggunakan bahan obat hewan sebagai campurannya.
 - f. Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pembuatan dan pemakaian ransum makanan ternak yang menggunakan bahan baku obat hewan sebagai campuran.
 - g. Melakukan pengamatan pengaruh residu obat hewan.
 - h. Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pemotongan dan pembunuhan hewan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan
5. Kepala Bidang Kelembagaan dan Budidaya Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang Kelembagaan dan Budidaya Ternak.

Bidang Kelembagaan dan Budidaya Ternak membawahi :

- a. Seksi Kelembagaan dan usaha Peternakan
- b. Seksi Budidaya dan Teknologi Terapan
- c. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak

Untuk Melaksanakan tugas Kepala Bidang Kelembagaan dan Budidaya Ternak, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan terhadap petani peternak secara perorangan, kelompok dan badan hukum yang bergerak dibidang peternakan.
- b. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis budidaya, teknologi produksi dan reproduksi ternak.
- c. Pelaksanaan peningkatan mutu genetik ternak dan peningkatan mutu pakan ternak.
- d. Pelaksanaan Identifikasi, penyiapan lokasi penyebaran dan pengembangan ternak serta penyebaran dan pengembangan hijauan pakan ternak.
- e. Pelaksanaan urusan penataan, distribusi dan redistribusi ternak
- f. Pelaksanaan pengawasan, peredaran dan penggunaan bibit ternak dan pakan ternak.

Kepala Seksi Kelembagaan dan Usaha Peternakan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana seksi Kelembagaan dan Usaha Peternakan sesuai dengan rencana kerja Dinas
- b. Melaksanakan bimbingan penguatan kelembagaan kepada masyarakat peternak, kelompok tani ternak dan atau badan hukum yang bergerak di bidang peternakan.
- c. Melaksanakan penataan dan pengaturan terhadap pengembangan usaha peternakan.
- d. Melaksanakan penyuluhan dan pengkajian terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat peternak.
- e. Melaksanakan pemrosesan dan atau pemberian rekomendasi terhadap persyaratan perizinan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- f. Melaksanakan pengawasan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, hasil ternak dan usaha pengolahan hasil ternak.

Kepala seksi Budidaya dan Teknologi Terapan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana seksi Budidaya dan Teknologi Terapan sesuai dengan rencana kerja Dinas.
- b. Melaksanakan pemantauan dan inventarisasi potensi wilayah sumber bibit.
- c. Membimbing produksi dan registrasi ternak bibit, memantau mutu dan produktifitas ternak bibit.
- d. Melaksanakan pencatatan, seleksi, pengujian dan pengawasan serta pemberian surat keterangan mutu bibit ternak untuk keluar/masuk Kabupaten.
- e. Membimbing pelaksanaan kaji terap.
- f. Melaksanakan pembinaan, pengadaan, penyebaran, pemanfaatan dan pengembangan hijauan pakan ternak.
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengujian pakan ternak.
- h. Melaksanakan pemuliabiakan ternak dengan teknologi peningkatan mutu ternak.

Kepala Seksi Penyebaran dan dan Pengembangan Ternak, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana seksi Penyebaran dan dan Pengembangan Ternak sesuai dengan rencana kerja Dinas.

- b. Melaksanakan pembinaan identifikasi, potensi wilayah penyebaran dan pengembangan peternakan.
 - c. Melaksanakan identifikasi, potensi dan lokasi penyebaran dan pengembangan ternak.
 - d. Menyusun usulan penetapan tata ruang kawasan peternakan.
 - e. Melaksanakan penataan distribusi dan redistribusi ternak.
 - f. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penyebaran serta pengembangan ternak didaerah pengembangan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas di lapangan. Masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas antara lain:
- a. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - b. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rumah Potong Hewan.
 - c. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala Dinas, sedangkan jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Tenaga fungsional dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4.1.2 Sumber Daya SKPD

Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumberdaya yang dimiliki seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Daftar Nama-Nama Pegawai Negeri Sipil Pejabat Dan Staff Dinas
Peternakan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012

No	Nama	Gol./Ruang TMT	Jabatan	Pendidikan
1	Ir. Heru Santoso	Pembina Utama Muda / IV-c	Kepala Dinas	S1 Peternakan
2	drh. Benny Handarwanto	Pembina Tk.I / IV-b	Sekretaris	S1 Kedokteran Hewan
3	drh. Bambang Sugiyanto	Pembina Tk.I / IV-b	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	S1 Kedokteran Hewan
4	drh. Satriyo Aribowo	Pembina / IV-a	Staf	S1 Kedokteran Hewan
5	Sumardi	Penata Tk.I / III-d	Staf	SMA
6	Budi Setiyono, SP.M.si	Penata Tk.I / III-d	Kasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak	S1 Pertanian S2 Administrasi Publik
7	Abdurrazak, S.Pt	Penata Tk.I / III-d	Kasi Kelembagaan dan Usaha Peternakan	S1 Peternakan
8	Umi Indi Hartati, S.AP	Penata Tk.I / III-d	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	S1 Administrasi Negara
9	drh. Aguslan	Penata Tk.I / III-d	Kasi Pengobatan dan	S1 Kedokteran Hewan

				Pemberantasan Penyakit Hewan	
10	drh. Muh. Lukman Hadi	Penata Tk.I / III-d	Kepala Bidang Kesmavet	S1 Kedokteran Hewan	
11	drh. Nanang Sugiharto	Penata Tk.I / III-d	Kepala Bidang Kelembagaan dan Budidaya Ternak	S1 Kedokteran Hewan	
12	drh. Acmad Gozali	Penata Tk.I / III-d	Staf	S1 Kedokteran Hewan	
13	drh. Kartika Wulansari	Penata Tk.I / III-d	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	S1 Kedokteran Hewan	
14	Irfani Taufik, SP	Penata / III-c	Staf	S1 Pertanian	
15	drh. Ni Luh Putu Suryani	Penata / III-c	Kasi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Hewan	S1 Kedokteran Hewan	
16	drh. Puspito Sulistyowati	Penata / III-c	Kasi Obat dan Kesejahteraan Hewan	S1 Kedokteran Hewan	
17	Drh. Catur Wahyuni Pujiastuti	Penata / III-c	Kasi Bahan Asal Hewan	S1 Kedokteran Hewan	
18	A, Karyadi, SH	Penata / III-c	Kepala Sub	S1 Hukum	

			Bagian Umum dan Kepegawaian	
19	drh. Rizki Faraisa	Penata / III-c	Staf	S1 Kedokteran Hewan
20	drs. Abdul Muksin	Penata / III-c	Staf	S1 Ilmu Sosial Politik
21	Asian Joko Suprayitno, SP	Penata / III-c	Staf	S1 Pertanian SosEk
22	Wagiran	Penata Muda Tk.I / III-b	Staf	SMA
23	Suroso	Penata Muda Tk.I / III-b	Staf	SMA
24	Hartoyo	Penata Muda Tk.I / III-b	Staf	SMA
25	H. Sujarno	Penata Muda Tk.I / III-b	Staf	SMA
26	Al Munir	Penata Muda Tk.I / III-b	Staf	SMA
27	Yudiono	Penata Muda Tk.I / III-b	Staf	SMA
28	Suwedi	Penata Muda Tk.I / III-b	Staf	SMA
29	Ahmad Zamroni	Penata Muda Tk.I / III-b	Staf	SMA
30	Moh. Rustam Dwi Atmojo,	Penata Muda Tk.I / III-b	Kasi Budidaya dan Teknologi	S1 Peternakan

	S.Pt		Terapan	
31	Sarpin, SP	Penata Muda Tk.I / III-b	Staf	S1 Pertanian SosEk
32	Bambang Nurseno, S.pt	Penata Muda Tk.I / III-b	Staf	S1 Peternakan
33	Arie Harioko Kurniawan, S.Pt	Penata Muda Tk.I / III-b	Staf	S1 Peternakan
34	Agus Setyono, S.Pt	Penata Muda / III-b	Staf	S1 Peternakan
35	Suwanto, S.Pt	Penata Muda Tk.I / III-b	Staf	S1 Peternakan
36	drh. Purwaningtyas	Penata Muda Tk.I / III-b	Staf	S1 Kedokteran Hewan
37	Nanang Wapendik	Penata Muda Tk.I / III-b	Staf	SPP SNAKMA
38	Achmad Syaiful	Penata Muda / III-a	Staf	SPP / SPMA
39	Erwan Patriadi, SP	Penata Muda Tk.I / III-a	Staf	S1 Pertanian SosEk
40	Ichlas Jumrojab	Penata Muda / III-a	Staf	SPP SNAKMA
41	Riono	Pengatur Tk.I / IId	Staf	SMA Paket C
42	Dodik Yulianto, A.Md	Pengatur Tk.I / II-d	Staf	D3 Pertanian Teknik Peternakan
43	Indah Retno Wati, A,Md	Pengatur Tk.I / II-d	Staf	D3 Teknisi Peternakan
44	Nisfi Laely B, A.Md	Pengatur Tk.I / II-d	Staf	D3 Teknisi Peternakan
45	Hendy Ismanto	Pengatur Tk.I / II-d	Staf	SMA Kejuruan

46	Lintang Revinda	Pengatur / II-c	Staf	SMA
47	Agus Rohmas Saleh	Pengatur / II-c	Staf	SPP-SPMA
48	Moh. Sodik	Pengatur / II-c	Staf	Sek Peternakan Menengah Atas
49	Dedy Herdianto	Pengatur / II-c	Staf	SPP-SPMA
50	Imron Rosyadi	Pengatur / II-c	Staf	MAN
51	Ketut Suice, A.Md	Pengatur / II-c	Staf	D3 Kesehatan Hewan
52	Ferdiyanti Maria D, A.Md	Pengatur / II-c	Staf	D3 Kesehatan Ternak
53	Dina Kusdiana, A.Md	Pengatur / II-c	Staf	D3 Kesehatan Ternak
54	Tumijan	Pengatur Muda Tk.i / II-b	Staf	SMA
55	Bambang Sudiharto	Pengatur Muda Tk.I / II-b	Staf	SMA
56	Harsono	Pengatur Muda Tk.I / II-b	Staf	Paket C
57	Anang Santoso	Pengatur Muda / II-a	Staf	Sekolah Dasar
58	Suparman	Pengatur Muda / II-a	Staf	Sekolah Dasar
59	Kurniawan Hadi Wibowo	Pengatur Muda / II-a	Staf	STM Mesin
60	Slamet Suryadi	Pengatur Muda / II-a	Staf	SMK Kejuruan
61	Yusup Efendi	Pengatur Muda / II-a	Staf	STM Mesin
62	Priono	Juru / I-c	Staf	SMP
63	Miswadi	Juru / I-c	Staf	SMP
64	Moh. Tahol	Juru Muda / I-a	Staf	Paket A

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Tahun 2012 Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi.

4.1.3 Visi dan Misi

a. Visi

"Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Mandiri, Sejahtera Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia".

Visi Tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kemandirian Daerah adalah kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. Kesejahteraan Masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan ekonomi yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan di sini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin di raih tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja. Kemajuan-kemajuan itu juga berkaitan dengan dimensi mental spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlak mulia.
3. Peningkatan perekonomian di arahkan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya pertanian. Industri, perdagangan dan jasa. Lembaga keuangan dan koperasi, serta pariwisata yang di dukung oleh infrastruktur fisik dan non fisik yang memadai.
4. Untuk mempercepat program-program tersebut perlu ditingkatkan pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja instansi pemerintah daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan.

b. Misi

Misi adalah Perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
2. Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan dan aspek kelestarian lingkungan.
4. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
5. Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
6. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
9. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.

4.1.4 Profil Kelompok

Kelompok Blambangan Makmur yang didirikan pada tanggal 11 Februari 2009 dan bertempat di Kecamatan Srono Desa Rejoagung Kabupaten Banyuwangi adalah kelompok yang melalui Keputusan Kepala Dinas Peternakan No: 188/1619/KEP/429.104/2013 diputuskan sebagai penerima bantuan Program Integrasi Ternak Unggas memiliki struktur kepengurusan sebagai berikut.

Tabel 4.2 Struktur Kepengurusan Kelompok Blambangan Makmur

No	Nama	Jabatan
1	Ali Muktar	Ketua
2	Rodliyah CH	Sekretaris
3	Fachrul Roji	Bendahara
4	Sururiyah, S.Pt	Seksi Keswan
5	Zainuri	Seksi Pakan
6	Sunarto	Seksi Keamanan
7	Saimik	Seksi Perkandangan
8	Muntholib Abd Azis	Seksi Pemasaran
9	H. Syaifudin	Seksi Sosial

Sumber: Kelompok Blambangan Makmur

4.2 Transparansi Implementasi Program Integrasi Ternak Unggas di Kabupaten Banyuwangi

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah

satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional. Transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Hal ini juga mencakup pengertian bahwa informasi tersedia secara cuma-cuma dan dapat diakses secara mudah dan langsung, dan transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Krina (2003: 16-17) menyebutkan beberapa alat-alat ukur transparansi, yaitu :

- a. Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi : *annual reports*, brosur, leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, website, papan pengumuman, koran lokal
- b. Informasi yang disajikan : acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan.
- c. Penanganan keluhan : berita-berita kota di media massa dan lokal, *notice of respon*, limit waktu respon, *opinion pools & survey* tentang isu-isu kebijakan publik, komentar & catatan untuk draft kebijakan & peraturan, *service users surveys*.
- d. Institusi dan organisasi daerah : Bawasda, kantor PMD/BPM, kantor Humas, dinas Kominfo, Forum Lintas Pelaku.
- e. Pertemuan masyarakat.
- f. Mimbar rakyat.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa transparansi memiliki beberapa tolak ukur, akan tetapi pada program integrasi ternak unggas di Kabupaten Banyuwangi poin (d) dan poin (f) tidak penulis temui.

Program integrasi ternak unggas adalah program dari kementerian pertanian Republik Indonesia yang jumlah anggarannya sudah diatur oleh pusat dan diambil dari APBN, termasuk kuota penerima bantuan telah diatur oleh pusat. Menurut Ir. Heru Santoso selaku kepala Dinas Peternakan Kabupaten banyuwangi.

“program integrasi ternak unggas merupakan bentuk pemberdayaan kepada masyarakat melalui kelompok ternak, fokusnya pada unggas. Kegiatan pengembangan integrasi ternak unggas di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2013 melalui sumber dana APBN dialokasikan pada Kelompok Peternak Ayam Blambangan makmur desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Bayuwangi.” (Wawancara, 21 Agustus 2014)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh drh. Nanang Sugiharto selaku Kepala Bidang Kelembagaan & Budidaya Ternak yang mengatakan:

“Program integrasi ternak unggas ini oleh Pemerintah Pusat sudah ditentukan untuk alokasi kelompok yang menerima bantuan secara nasional, jadi gini dik.. secara nasional misalkan ada sepuluh dan Jawa Timur kebagian tiga, nah Banyuwangi kebagian satu.” (Wawancara, 22 Agustus 2014)

Lebih lanjut Menurut Kasi Budidaya dan Teknologi Terapan Moh. Rustam Dwi Atmojo, S.Pt:

“kelompok yang mengajukan program ini hanya dua dan kebetulan yang mendapatkan program ini adalah Blambangan Makmur, karena kelompok ini belum pernah mendapatkan bantuan program, berbeda dengan Prabu Blambangan yang sebelumnya sudah mendapatkan program.” (Wawancara, 25 Agustus 2014)

Masih Menurut Kasi Budidaya dan Teknologi Terapan Moh. Rustam Dwi Atmojo, S.Pt menjelaskan kriteria kelompok yang dapat melaksanakan program ini dengan beberapa pertimbangan.

“Kelompok penerima kegiatan adalah kelompok yang telah diidentifikasi dan diseleksi oleh Dinas sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, dan kelompok ini kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan atau Instansi yang melaksanakan fungsi peternakan provinsi, sebagai kelompok penerimaan kegiatan. Salah pertimbangan yang digunakan dalam menentukan kelompok penerima salah satunya ketersediaan pakan, kemampuan dalam mengelola, serta kemampuan dalam mengembangkan.” (Wawancara, 25 Agustus 2014)

Program integrasi ternak unggas sendiri bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan bahan pakan lokal sehingga petenak mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan pakan ternaknya.

4.2.1 Publikasi Kebijakan Publik

Transparansi menjadi salah satu ukuran penting dari good governance. Pelayanan dinilai baik atau buruk, salah satunya ditentukan oleh tingkat transparansi di dalam pemerintahannya. Transparansi menjadikan peran penting dalam sukses atau tidaknya pelayanan publik. Pelayanan publik tersebut transparan apabila semua informasi yang secara sistem, prosedur, mekanisme, serta hak dan kewajiban yang menyangkut pelayanan dapat diperoleh secara bebas oleh masyarakat.

Publikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan / menyebarkan sebuah informasi masyarakat umum dengan cara bermacam-macam mulai dari buku, teks, gambar, konten audio visual, website, cd dan mp3. Kata publikasi berarti melakukan kegiatan penerbitan atau penyalinan. Pada program integrasi ternak unggas yang dikelola oleh kelompok melalui Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi telah menyediakan sejumlah informasi kepada masyarakat umum mengenai program integrasi. Kualitas pelayanan yang transparan mewujudkan penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Masyarakat yang ingin memperoleh informasi secara manual mengenai proses pengolahan data menjadi sebuah informasi terkadang mendapat kendala, salah satunya adalah sulitnya bertemu dengan unit kerja yang paling memahami mengenai pengolahan data serta penyajian informasi menjadi sebuah teknologi informasi selain itu kendala lokasi yang cukup jauh dari tempat tinggal menjadi pemicu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan teknologi informasi. Program integrasi menurut Ir. Heru Santoso:

“o..begini mas... program ini dari pemerintah pusat yang sumbernya dari APBN, berupa bantuan sosial dalam bentuk program integrasi unggas, kebetulan kabupaten banyuwangi dapat jatah satu untuk diajukan. Kelompok Blambangan Makmur yang terletak di Desa Rejoagung sendiri

memiliki potensi peternakan ayam, sebab daerah tersebut penduduknya gemar memelihara unggas, selain itu banyak terdapat lahan pertanian lahan kering dan lahan persawahan yang ditanami jagung sehingga memungkinkan untuk diintegrasikan kegiatan tanaman jagung dengan peternakan ayam, artinya jika program ini berjalan setiap elemen yang mendukung pada program ini akan dimanfaatkan, misalnya jika unggas sudah berkembang sementara kelompok tidak memiliki persediaan untuk pakan unggas maka kecenderungannya akan konsumtif, tapi berbeda kasusnya jika kelompok bisa tanam jagung sendiri sehingga akan terpenuhi kebutuhan untuk pakan apalagi di desa tersebut terdapat usaha penggilingan padi yang menghasilkan limbah untuk usaha peternakan berupa dedak, katul.”

(Wawancara tanggal 21 Agustus 2014)

Keberadaan informasi menjadi sangat penting mengingat program ini merupakan agenda dari pemerintah pusat, sehingga setiap bagian kecil dari masyarakat diharapkan dapat menjangkau pada program dengan asumsi menciptakan kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat untuk turut serta mengajukan diri sebagai kelompok pada program tersebut. Bentuk pemberian informasi memang sebaiknya efektif disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Ir. Heru santoso:

“pengajuan program ini harus berupa kelompok yang memang konsentrasinya pada unggas, sementara ini hanya hanya dua kelompok yang mengajukan yaitu Blambangan Makmur dan Prabu Blambangan. Bentuk pemberian informasinya terfokus kepada kelompok saja karena program ini hanya untuk kelompok yang sudah memiliki struktur organisasi lengkap mas, pihak dinas melalui petugas teknis menginformasikan kepada beberapa kelompok yang konsentrasinya pada unggas saja mas. Selain itu pihak dinas juga menyediakan pengumuman bahwa terdapat program integrasi unggas yang diletakkan di dinas pada papan informasi mas.” (Wawancara tanggal 21 Agustus 2014).

Pernyataan tersebut dipekuat oleh sekretaris Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi Drh. Benny Handarwanto menjelaskan bahwa:

“yang kami upaya disini hanya memaksimalkan papan informasi tersebut dik untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat.... Jadi siapa saja yang datang ke dinas jelas akan mengetahui informasi tersebut.”
(Wawancara, 21 Agustus 2014).

Menurut Kasi Budidaya dan Teknologi Terapan Moh. Rustam Dwi Atmojo,
S.Pt:

“... program ini prosesnya sejak tahun 2012, dinas melalui petugas teknis menyampaikan masalah program ini. Hanya ada dua kelompok yang mengajukan yaitu Prabu Blambangan dan Blambangan Makmur.” (Wawancara, 25 Agustus 2014)

Hal senada juga disampaikan oleh pengurus dari masing-masing kelompok. Ali Muktar selaku ketua dari kelompok Blambangan Makmur mengatakan, “pihak kelompok telah diberitahu sebelumnya melalu petugas teknis kalau tidak salah satu tahun sebelum program dimulai (Wawancara, 6 September 2014).”

Sedangkan Ir. Suhartono selaku ketua dari kelompok Prabu Blambangan mengatakan:

“Ya, kami sudah diberitahu sebelumnya pada saat itu bersama dari kelompok Blambangan Makmur. Petugas teknis dari Dinas telah menginformasikan mengenai detail program kepada kami..”
(wawancara, 7 September 2014)

Pemberian informasi melauai petugas ini dinilai memang kurang efektif mengingat banyaknya jumlah permintaan berkaitan dengan informasi tersebut. Meski demikian bukan berarti pihak dinas tidak melayani jika masyarakat ingin mencari tahu dan sebagainya. Pihak dinas melalui Bidang Kelembagaan & Budidaya Ternak Drh. Nanang Sugiharto menjelaskan:

“sementara ini kami hanya memaksimalkan petugas teknis sebagai penyampai informasi kepada masyarakat dik, petugas teknisnya kan banyak dik... intinya setiap staf dan kepada bidang disini tahu semua tentang program ini, sehingga memungkinkan mereka juga menyampaikan program ini kepada masyarakat”

(Wawancara, 22 Agustus 2014)

Sementara ini upaya yang nampak dilakukan oleh pihak dinas untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan program Integrasi tersebut melalui petugas teknis yang memang langsung bersentuhan dengan masyarakat ataupun kelompok. Petugas ini diharapkan dapat menjaring setiap informasi yang masyarakat ataupun kelompok serta memberikan informasi pula pada masyarakat dan kelompok berkaitan dengan program dinas terutama masalah program integrasi. Upaya ini sedikit memberikan hasil yang positif mengingat minimnya kelompok ataupun masyarakat yang langsung datang ke dinas untuk menanyakan program. Seperti yang disampaikan kepala Desa Rejoagung ibu Usnatun Sulasiatin:

“saya tahu program ini memang jauh hari sudah dik., saya memang selalu aktif untuk menanyakan kepada pihak dinas berkaitan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saya.... Nah setelah itu saya dikabari dari dinas waktu bapak Nanang yang telepon saya bahwa ada program integrasi ternak unggas di desa ini dik.” (Wawancara, 15 September 2014)

Lebih lanjut Usnatun menjelaskan bahwa upaya untuk memberikan informasi yang baik memang perlu dilakukan oleh dinas mengingat program ini adalah program pemerintah seperti yang dikatakan:

“informasi ini tidak cukup begini saja dik, harus ada upaya yang lebih efektif yang harus dilakukan oleh pemerintah mengingat program ini adalah milik pemerintah yang peruntukannya untuk masyarakat, sehingga dengan banyak mengetahui program ini maka terdapat kecenderungan masyarakat akan terlibat secara massif dik.” (Wawancara, 15 September 2014)

Berdasarkan wawancara dengan kelompok penerima program bapak Ali Muhtar menjelaskan bahwa:

“Program ini mas, kami tahunya memang dari petugas teknis, setelah beberapa persyaratan kami penuhi akhirnya kami mengajukan diri untuk mendapatkan program ini mas, pengurusan semua berkas tersebut melibatkan kepala desa dan beberapa pihak lain. Saya memang jarang ke

dinas mas, terkecuali pada saat kelompok kami yang mendapatkan program tersebut, akhirnya kami sering kedinas untuk mengetahui informasi lebih jauh terkait dengan program ini atau untuk menyerahkan laporan tiap triwulan terkait dengan perkembangan dari program ini mas.”
(Wawancara, 6 September 2014)

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh RT bapak Nasrudin:

“selama ini komunikasi yang kami sering dibangun sebatas telepon dan dari bapak dedi selaku petugas teknis baik mulai dari pemberitahuan mengenai keberadaan program, serta mengikuti beberapa pelaksanaannya, seperti saat serah terima barang dari dinas kepada kelompok” (Wawancara, 6 September 2014)

Lebih lanjut Nasrudin menyampaikan agar pemerintah terutama pihak dinas agar lebih efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa ikut terlibat secara massif seperti yang dikatakan :

“pemerintah seharusnya lebih menyuluruh dalam memberikan informasi ini kepada masyarakat dik, hal ini bisa dilakukan dengan penyiaran pada radio, surat kabar dan sebagainya. Jika masyarakat banyak yang tahu, otomatis masyarakat akan banyak yang terlibat pada program ini. Karena masyarakat banyak yang terlibat dan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat disini dik,, saya saja bisa memperoleh pendapatan lebih dari membuat kandang disini.” (Wawancara, 6 September 2014)

Berdasarkan wawancara dengan kelompok prabu blambangan, yaitu kelompok yang ikut mengajukan ketertarikannya pada program, bapak Ir.Suhartono mengatakan bahwa:

“saya tahu program ini dari petugas teknis yang sering berkunjung pada kelompok kami, hal itu memang sering dilakukan oleh petugas dik. Entah itu bentuk ngontrol kegiatan kami dan sebagainya” (Wawancara, tanggal 7 September 2014)

Menurut Edi Santoso selaku Kepala Dusun Sumber Agung Kidul tempat program diadakan bahwa keberadaan informasi sangatlah penting bagi masyarakat secara lebih untuk agar bisa menikmati adanya informasi tersebut seperti yang disampaikan, “..saya rasa itu harus dik, biar masyarakat secara umum dapat

menikmatinya, tidak hanya dari mulut ke mulut saja kan bisa kabur informasinya dik (Wawancara, 15 September 2014).”

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa bentuk pemberian informasi yang diberikan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak dinas adalah melalui papan informasi dan petugas teknis. Sementara untuk bentuk pemberian informasi yang lainnya masih terkendala pada SDM yang dimiliki oleh pihak dinas seperti kemampuan dalam membuat Website resmi dinas dan sebagainya. Upaya yang dilakukan dinas sedikit memberikan dampak yang positif hal ini kentara bahwa masyarakat memang telah banyak mengetahui mengenai program tersebut. Meski tidak seluruh masyarakat mengetahui secara pasti detailnya namun upaya dinas terutama petugas teknis patut mendapatkan apresiasi.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Hal ini juga mencakup pengertian bahwa informasi tersedia secara cuma-cuma dan dapat diakses secara mudah dan langsung, dan transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Pemberian informasi kepada masyarakat umum merupakan bukti dari bentuk transparansi. Informasi ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan laporan kepada masyarakat mengenai perkembangan ataupun pelaksanaan program integrasi. Pemberian informasi ini diharapkan adanya keterbukaan informasi mengenai suatu program, tentunya dengan suatu harapan tidak terdapat penilaian yang tidak objektif terhadap pemerintah dalam mengelola suatu program. Pemberian informasi akan menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap suatu program. Semakin banyak informasi yang diberikan oleh pihak dinas kepada masyarakat ataupun kelompok merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan transparansi dalam pemerintahan.

Kegiatan ini pada gilirannya akan membentuk opini yang positif dari kelompok masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan dalam hal ini adalah Dinas Peternakan kabupaten Banyuwangi.

4.2.2 Informasi yang Disajikan

Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Peternakan perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat. Dinas Peternakan seharusnya perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.

Informasi yang disajikan turut serta akan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan dari program tersebut. Semakin baik penyajian informasi yang diberikan akan memungkinkan masyarakat turut serta memberikan penilaian ataupun evaluasi pada program tersebut. Menurut Kasi Budidaya dan Teknologi Terapan Moh. Rustam Dwi Atmojo, S.Pt:

“ini kan program pemerintah pengelolaannya memang harus terbuka agar dapat dipantau oleh semua pihak. Masalah pemberian informasi kepada masyarakat terdapat beberapa bentuk dik, selama ini pihak dinas menyediakan papan informasi. Saya sendiri menilai hal itu kurang efektif, jadi saya menyuruh petugas teknis untuk lebih aktif dalam memberikan sosialisasi dan sesekali mengundang kelompok untuk datang ke Dinas.”
(Wawancara, 25 Agustus 2014)

Menurut ketua kelompok Blambangan Makmur selaku kelompok penerima program Bapak Ali muhtar:

“..saya tahunya jumlah anggaran secara total, detailnya saya tidak paham, saya hanya menerima semua dalam bentuk barang bukan uang. Saya dan teman-teman yang lain hanya mengajukan anggaran yang peruntukannya untuk kegiatan program seperti beli mesin, beli ayam, pakan, biaya tanam jagung dll..”

(Wawancara, 6 September 2014)

Lebih jauh Ali muhtar menjelaskan bahwa informasi yang akurat serta detail perlu memang disajikan oleh pihak Dinas seperti yang disampaikan:

“informasi yang jelas, akurat serta terinci memang seharusnya disampaikan oleh pihak Dinas. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemahaman yang berbeda terkait dengan besarnya anggaran yang akan digunakan”

(Wawancara, 6 September 2014)

Menurut Bapak Ir. Suhartono, selaku ketua kelompok Prabu Blambangan menjelaskan tentang tersedianya sumber informasi yang akurat mengatakan bahwa :

“saya jarang ke dinas dik, pas awal dapat informasi program tersebut ya dari petugas teknis dan setelah beberapa hari kemudian saya dapat undangan untuk ke Dinas... memang ada papan pemberitahuan melalui papan informasi tersebut dik. Disana memang ada informasi mengenai jumlah anggaran pada pelaksanaan program tersebut”. (Wawancara, 7 September 2014)

Menurut Ir. Suhartono mengharapkan agar dalam penyajian informasi terutama jumlah anggaran memang harus jelas seperti yang dikatakan:

“informasi itu tidak cukup dengan jumlah anggaran secara keseluruhan, harus diperinci peruntukannya agar masyarakat terutama penerima program ini sama-sama mengetahui” (Wawancara, 7 September 2014)

Tersedianya informasi berkaitan dengan kemudahan masyarakat ataupun kelompok dalam mendapatkan atau mengakses informasi berkaitan dengan program integrasi ternak unggas. Kemudahan dalam mengakses informasi mengandung beberapa

pengertian, seperti informasi yang diberikan akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, informasi yang diberikan mudah diterima atau dijangkau oleh masyarakat, dan bisa dinikmati oleh siapapun. Informasi yang berkualitas memiliki ciri-ciri: akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap. Akurat artinya tidak bias, yakni informasi yang kita peroleh sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Tepat waktu, informasi diterima pada saat dibutuhkan. Relevan, hanya informasi yang berhubungan erat dengan problem yang kita hadapi yang digunakan.

Tersedianya informasi yang akurat melalui proses sosialisasi yang dilakukan pihak dinas merupakan bentuk dari upaya menciptakan transparansi dalam pengelolaan anggaran pada program integrasi ternak unggas. Mengingat informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses setiap pengguna informasi publik, maka Badan Publik harus menyediakan akses dan sarana infrastruktur yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa kewajiban untuk menyebarluaskan informasi publik dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal senada juga tertulis dalam Pasal 21 UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa mekanisme untuk memperoleh informasi didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.

Berikut adalah tabel rincian penggunaan anggaran untuk program integrasi ternak unggas.

Tabel 4.3 Rincian Pengelolaan Anggaran Program

No	Nama Barang	Banyaknya	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)
1	Jagung	900 kg	3.500	3.150.000
2	Konsentrat	1.400 kg	7.750	10.850.000
3	Bibit Ternak Ayam Buras	1.320 ekor	42.750	56.430.000
4	Bibit Jagung	100 kg	85.000	8.500.000

5	Urea	600 kg	2.500	1.500.000
6	Grinder	1 unit	35.000.000	35.000.000
7	Pemipil Jagung	1 unit	22.900.000	22.900.000
8	Kereta Dorong	1 unit	1.890.000	1.890.000
9	Mesin Jahit	1 unit	1.975.000	1.975.000
	Karung			
10	Sepatu Boot	3 unit	99.000	297.000
11	Sekop	2 unit	63.000	126.000
12	Administrasi	1 pkt	5.000.000	5.000.000
	Kegiatan			
13	Pelatihan	1 pkt	4.500.000	4.500.000
14	Penanaman	1 pkt	8.382.000	8.382.000
	Tanaman Pakan			
15	Pengadaan / Perbaikan Alat dan Mesin Pengolah Pakan	1 pkt	16.500.000	16.500.000
Jumlah			177.000.000	

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi

4.2.3 Penanganan Keluhan

Keluhan adalah saran dan masukan berupa kritikan dan atau keberatan yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis dari pihak eksternal maupun internal perusahaan mengenai kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan, apabila keluhan tidak ditanggapi secara maksimal, besar kemungkinan masyarakat akan kecewa. Untuk mengatur penanganan keluhan agar dapat tercapai penyelesaian masalah secara tepat dan cepat dalam upaya mencapai tindakan perbaikan dan pencegahan yang efektif dan efisien. Sebagai suatu program dengan pendekatan integrasi mengupayakan setiap

elemen yang program tersebut dapat berdaya guna dan saling mendukung. Masyarakat memiliki peran penting bagi keberlangsungan daerah, sebab masyarakat sebagai pelaku dari setiap kebijakan yang ditetapkan oleh daerah. Sehingga menjadi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada publik melalui informasi yang berkualitas. Kepercayaan terjadi ketika pihak yang memiliki persepsi tertentu yang menguntungkan satu sama lain yang memungkinkan hubungan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kelompok atau lembaga akan terbebas dari kekhawatiran dan kebutuhan untuk memonitor perilaku pihak lain, sebagian atau seluruhnya. Menurut penjelasan Drh. Nanang Sugiharto :

“tidak terdapat prosedur pasti mengenai tata cara pengaduan keluhan dik, akan tetapi keluhan masyarakat bisa berbentuk lisan ataupun tertulis dik. Lisan mereka bisa datang langsung kepada kami selama jam kerja atau juga mereka bisa via telepon menyampaikan keluhannya. Sementara untuk yang tertulis pihak kami telah menyediakan kotak yang peruntukannya untuk saran atau kritik terhadap Dinas, namun dengan catatan pengirim harus jelas alamat dan biodata dirinya atau bisa menyertakan no telepon yang bisa dihubungi”. (Wawancara, 22 Agustus 2014)

Masih menurut Drh. Nanang Sugiharto:

“selama ini keluhan masyarakat lebih sering menggunakan telepon atau datang langsung. Pihak kami selalu respek terhadap segala bentuk permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat. Kami tidak akan membiarkan masalah itu semakin menyebar kepada orang lain dan menjadi pembicaraan yang bebas, sehingga setiap keluhan yang kami terima langsung diproses. Bentuk penyelesaian keluhannya sangatlah beragam tergantung dari bentuk keluhannya dik,.. ” (Wawancara, 22 Agustus 2014)

Program ini juga dilakukan untuk membangun sinergi antara instansi/lembaga dengan seluruh masyarakat terutama kelompok. Menurut ketua kelompok penerima program Ali Muhtar menjelaskan bahwa:

“setiap terdapat permasalahan saya biasanya datang langsung ke dinas mas, jarang saya menggunakan telepon. Jika datang langsung kan bisa leluasa menyampaikan keluhan. Keluhan kami seputar tata cara dalam pembuatan laporan dan beberapa persoalan kecil terkait dengan keberhasilan program ini”. Lanjut Ali Muhtar “pengajuan keluhannya ini tidak ribet mas, cukup

datang atau via telepon sudah bisa dilayani dan diproses” (Wawancara, 29 Agustus 2014)

Keluhan merupakan bentuk dari kontrol atau pengawasan dan pihak lain yang diharapkan dapat dipahami sebagai masukan oleh pihak dinas. Masyarakat harus peka dan waspada terhadap proses penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Adanya sikap semacam ini akan memicu keingintahuan masyarakat (secara dalam dan luas) pada hal-hal yang berlaku di sekitarnya. Dengan demikian jawaban atas keingintahuan masyarakat tersebut sangat potensial menjadi data dan informasi sebagai salah satu sumber data yang berguna untuk disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Partisipasi masyarakat sebagai salah satu prinsip *good governance*, dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat yaitu di mana para stakeholder sebagai partisipan saling mempengaruhi dan berbagi kontrol atas inisiatif pembangunan, keputusan dan juga sumberdaya yang akan mempengaruhi mereka

4.2.4 Pertemuan Masyarakat

Keterlibatan anggota masyarakat dan kelompok lain merupakan bentuk dari transparansi, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan *Feedback* atau *Outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dalam dua hal yaitu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat dan upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Menurut Ir. Heru Santoso selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi mengatakan:

“Pada pelaksanaan program ini masyarakat sekitar penerima program memang ikut andil dalam kegiatan ini. Mereka kami undang untuk mensosialisasikan secara teknik masalah program integrasi ini. Ternak unggas kan menghasilkan kotoran dan menyebabkan bau dik, sehingga hal

itu menjadi pertimbangan kenapa masyarakat harus dilibatkan dalam acara sosialisasi tersebut, Yang diundang waktu itu ya dari masyarakat sekitar, RT, sampai ke perangkat desa. (Wawancara, 21 Agustus 2014)

Partisipasi masyarakat sebagai pelaku dari setiap kegiatan dari program integrasi akan memberikan dampak positif terhadap terlaksana suatu program. Semakin besar tingkat keterlibatan masyarakat dalam suatu program memungkinkan pelaksanaan kegiatan akan berjalan lancar dan transparan. Sehingga pertemuan dengan masyarakat untuk membicarakan masalah program integrasi menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah terutama dinas peternakan Kabupaten Banyuwangi. Menurut drh. Benny selaku sekretaris dinas menjelaskan bahwa:

“iya ada pertemuan dengan masyarakat, malah beberapa kali katanya, karena saya hanya mengikuti sekali dik waktu sosialisasi karena selebihnya bapak Nanang yang mengkoordinasi selanjutnya. Pertemuan ini dilakukan pada saat pihak dinas mendapatkan jatah program ini. Terus kami informasikan kepada masyarakat, hasilnya dilakukanlah pertemuan tersebut, tetapi tidak semua masyarakat yang diundang hanya beberapa yang kami anggap bersinggungan langsung dengan program. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi”. (wawancara, 21 September 2014)

Sementara menurut Drh Nanang Sugiarto menjelaskan:

“fungsi masyarakat sangat penting dik disini,, mengingat ini merupakan program integrasi, dimana setiap elemen yang dimiliki masyarakat terutama daerah lingkungan penerima program dapat menjadi bagian dari kegiatan ini. Sehingga semakin baik partisipasi masyarakat dalam program ini akan semakin membantu pelaksanaan dari program ini dik” (Wawancara, 22 Agustus 2014)

Pernyataan ini diperkuat oleh kepala Desa Rejoagung Ibu Usnatun:

“iya ada dik, saya diundang pada acara sosialisasi program tersebut, banyak juga bawahan saya yang ikut hadir. Pada kegiatan tersebut dijelaskan detail masalah teknis pelaksanaan program ini dik baik dari ketersediaan pakan, lahan untuk tanaman dan sebagainya”. Lanjut Usnatun ”pertemuan dengan masyarakat saya rasa sudah terwakili dan pelaksanaannya memang efektif mengingat program ini hanya untuk kelompok yang kegiatan usahanya

adalah unggas, kan tidak mungkin mengundang kelompok yang konsentrasinya ternak sapi dik” (Wawancara, 10 September 2014)

Hal senada juga disampaikan oleh pengurus dari masing-masing kelompok. Menurut kelompok penerima program Ali muhtar mengatakan bahwa:

“iya dik ada memang pertemuan dengan kelompok yang dilakukan pihak dinas. Bahasannya mengenai program unggas ini, tidak semua anggota kelompok hadir hanya perwakilan saja, pertemuan lebih inten ketika program ini telaksana dik”. (Wawancara, 29 Agustus 2014)

Menurut Ir. Suhartono selaku ketua dari kelompok Prabu Blambangan mengatakan:

“saya menghadiri pertemuan dengan pihak dinas pada saat sosialisasi program ini mas, tidak semua kelompok datang hanya perwakilan saja. Pertemuan itu hanya membahas banyak masalah program secara teknis semata, termasuk didalamnya pengadaan barang dan jasa seperti ketersediaan unggas, pakan dan mesin mas” (Wawancara, 08 September 2014)

Keterlibatan masyarakat terhadap program akan memberikan dampak positif baik sebagai evaluasi dan kontrol atas keberhasilan suatu program. Selain itu kegiatan pertemuan dengan masyarakat akan meningkatkan tingkat kepercayaan dan pengetahuan masyarakat terhadap pihak dinas. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, maka akan menjamin meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan akan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran/ penyimpangan dalam pengelolaan program pemerintahan. Hal ini memungkinkan suatu program akan lebih transparan dan terbuka pelaksanaannya sehingga upaya untuk menciptakan good government dapat terwujud. Kegiatan pertemuan dengan masyarakat yang dilakukan pihak dinas seharusnya menjadi media untuk menyampaikan segala bentuk informasi yang memungkinkan dapat memberikan kesempatan dan peluang kepada masyarakat untuk menjadi bagian dari setiap program yang diperoleh.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari serangkaian penelitian yang telah dilakukan oleh penulis baik melalui wawancara dan pengamatan berkaitan dengan Transparansi Pengelolaan anggaran program integrasi ternak unggas dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan program integrasi ternak unggas kabupaten banyuwangi yang dikelola oleh Kelompok Blambangan Makmur sudah transparan. Hal ini ditandai dengan beberapa indikator meliputi:

1. Publikasi kebijakan Publik pada program integrasi unggas pada Dinas Peternakan Kabupaten Bayuwangi terdapat dua bentuk yaitu papan informasi yang terdapat di dinas dan petugas teknis. Petugas teknis dinilai lebih efektif dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengingat minimnya jumlah masyarakat yang datang kedinas. Pihak Dinas Peternakan sendiri telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau kelompok melalui petugas teknis untuk menginformasikan tentang program dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk mendapatkan program tersebut. Sosialisasi telah diberikan 1 tahun sebelum program berjalan, sehingga masyarakat, kelompok, dan peminat program dapat mempersiapkan apa saja syarat yang harus dipenuhi apabila berminat pada program tersebut. Pemberian informasi tersebut diharapkan adanya transparansi mengenai suatu program dan tidak terjadi penilaian yang kurang objektif. Kegiatan ini pada gilirannya akan membentuk opini yang positif dari kelompok masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan dalam hal ini adalah Dinas Peternakan kabupaten Banyuwangi.
2. Tersedia informasi bagi masyarakat secara umum mengenai program integrasi ternak unggas. Tersedianya informasi ini mengandung pengertian kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi kepada dinas. Hal ini terlihat dari kemudahan penulis dalam mendapatkan informasi program, baik mengenai apa itu program integrasi ternak unggas, apa saja kegiatan program, sampai pengelolaan

anggaran dari program tersebut. Kemudahan untuk mengakses mengenai program itu sendiri dinilai masih ada sedikit kekurangan dengan tidak adanya website resmi milik dinas sehingga informasi yang disajikan selama lebih pada penjelasan dan beberapa berkas yang bisa digandakan oleh masyarakat. Penulis juga menemukan adanya papan informasi di lapangan yang menjelaskan bahwa ternak ayam, ladang jagung, alat dan lainnya tersebut hasil dari program integrasi.

3. Penangan keluhan erat kaitannya dengan pelayanan yang diberikan oleh dinas kepada masyarakat. Tidak terdapat prosedur pelayanan yang tetap namun pihak dinas telah menyiapkan kotak saran dan serta no telepon yang bisa dihubungi untuk menyampaikan keluhan kepada dinas. Selain itu masyarakat bisa langsung datang ke dinas untuk menyampaikan keluhan atau permasalahannya secara langsung kepada pihak atau bidang yang dituju. Penangan keluhan membuka ruang bagi masyarakat untuk turut serta ikut mengontrol dan mengawasi pelaksanaan dari program.
4. Pertemuan dengan masyarakat kerap kali dilakukan untuk secara sosialisasi dan pembahasan teknis mengenai program integrasi. Terdapat banyak pihak yang terlibat seperti kepala desa beserta bawahannya, kelompok ternak unggas. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program mengindikasikan upaya untuk menciptakan transparansi dari pelaksanaan program. Meski tidak semua masyarakat ikut terlibat mengingat sasaran program hanya pada kelompok yang kegiatannya hanya pada unggas, namun tidak menutup kemungkinan masyarakat mengetahui dan ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dari program ini.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah

Mengupayakan semaksimal mungkin agar program integrasi ini dapat berjalan dan berkembang dalam waktu yang panjang dengan terus mengevaluasi dan mengawasi program ini agar tidak vakum. Selain itu guna untuk *good governance* diharapkan agar pemerintah sedapat mungkin melakukan pembenahan terkait publikasi

informasi publik melalui radio, website dan sebagainya. Tersedianya informasi yang detail bisa diupayakan oleh dinas agar masyarakat dapat menikmati informasi yang dari dinas. Untuk penanganan keluhan diharapkan pihak dinas menyediakan telepon bebas pulsa sehingga masyarakat akan semakin aktif untuk melakukan koreksi, menyampaikan keluhan dan sebagainya. Sementara untuk pertemuan dengan masyarakat perlu ditingkatkan baik yang menjadi kelompok pelaksana program ataupun diluarnya untuk memberikan pemahaman tentang ternak unggas yang baik dan sebagainya.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan agar semakin aktif dan kritis dalam mengawasi kegiatan program ini terutama berkaitan dengan keterbukaan informasi agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mengontrol keberlangsungan program ini. Partisipasi masyarakat secara massif diharapkan terus meningkatkan agar pelaksanaan program ini dapat terlaksana dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara
- Adrianto, Nico. 2007. *Good Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Palangkaraya. Bayu Media.
- Buku Pintar Penyuluhan Peternakan, 1993, Direktorat Bina Penyuluhan Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Jakarta.
- Charles T. Horngren Dialihbahasakan oleh Desi Adhariani, 2005. *Akuntansi Biaya*. Edisi 11, jilid 1. PT. Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan. Publik*. Yogyakarta.
- Fukuyama, Francis. 2005. *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*. Terjemahan A. Zaim Rofiqi. Jakarta : Gramedia.
- Gie, The Liang 2000. *Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta : Modern Liberty.
- Harahap, Sofyan Syarif, 2001, *Teori Akuntansi, Edisi Revisi*, Penerbit PT Raja. Grafindo Persada, Jakarta.
- Husaini, Usman. 2012. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Jogiyanto, Hartono. 2004. *Pengenalan Komputer*. Yogyakarta : C.V Andi Offset
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Lalolo, Loina Krina P, 2003. *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi, Sekretariat Good Governance* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

- Laporan Kegiatan PDSR (Participatory Disease Surveillance and Respons), 2013. Dinas Peternakan Kabupaten banyuwangi.
- Manullang, M. 2006. *Manajemen Personalia Edisi 3*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Mardiasmo, 2006, *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol.2 No.1 Mei 2006.
- Maryono, Warella, Kismartini, 2007. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Provinsi Jawa Tengah.
- Moleong, J Lexy. 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya.
- Mulyadi., 2002. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Penerbit Aditya Media.
- Mursyidi. 2009. *Akunatnsi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT. Refika. Aditama.
- Mustopadidjaja AR,. 2001. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi,Implementasi Dan Evaluasi Kinerja, Lembaga Administrasi Negara, Republik Indonesia*. Jakarta: Duta Pertiwi Foundation
- Nafarin M, 2004 : *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta : Salemba empat.
- Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Integrasi Ternak Unggas Tahun 2013.
- Rohman, Arif. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Gahalia Indonesia.
- Sedarmayanti. 2009. *Good Governmance & Good Corporate Governmance*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Singarimbun dan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.
- Sopamah, Mardiasmo. 2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan antara pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI-16-17 oktober. Surabaya.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*., Alfabeta, Bandung.

- Suharsimi, Arikunto. 2000, *Manajemen Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Surakhmat, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode*. Bandung: CV. Tarsito.
- Suryaningrat, Bayu, 1985. *Pustaka Kabupaten di Bumi Limbangan Dong Garut*. Tanpa Penerbit.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Sistem Administrasi publik Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2011. *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan)*
- Winarno Surakhmad, 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar dan Teknik*. Bandung: Tarsito.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi
No:188/1619/KEP/429.104/2013
- Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi
No:188/1340/KEP/429.104/2013
- Kepres No 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa
- Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000.
- Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 Pasal 3 Tentang Asas-Asas Hukum Penyelenggaraan Negara
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

C. Internet

- <http://ochimachi703.blogspot.com/2013/10/pengelolaan-manajemen-dan-pembiayaan.html?m=1>
- <http://fadillapermataputri.blogspot.com/2013/10/perencanaan-penetapan-manajemen-bagian.html?m=1>
- www.infokorupsi.com
- www.jaringnews.com

Dokumentasi Wawancara



Wawancara Dengan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi

Bapak Ir. Heru Santoso



Wawancara Dengan Kepala Bidang Kelembagaan dan Budidaya Ternak

Bapak drh. Nanang Sugiharto



Wawancara Dengan Kepala Desa

Ibu Usnatun Sulasiatin



Wawancara Dengan Kepala Dusun Sumber Agung Kidul

Bapak Edy Santoso



Wawancara Dengan Ketua Kelompok Prabu Blambangan

Bapak Ali Muktar



Wawancara Dengan RT

Bapak Nasrudin



Wawancara Dengan Ketua Kelompok Prabu Blambangan

Bapak Ir. Suhartono



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN
Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818
e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id

Nomor : 928 /UN25.3.1/LT.5/2014 26 Mei 2014
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
di -

BANYUWANGI

Memperhatikan surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 1986/UN25.1.2/LT/2014 tanggal 22 Mei 2014, perihal perpanjangan ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Raditya Dandy Handana/070910201112
Fakultas / Jurusan : Ekonomi/Ilmu Administrasi Negara
Alamat / HP : Perum Puri Bunga Nirwana Jember/Hp.
Judul Penelitian : Transparansi Pengelolaan Anggaran Pada Program Integrasi Ternak Unggas Pada Kelompok Blambangan Makmur di Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi
Lokasi Penelitian : Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi
Lama Penelitian : Dua bulan (26 Mei 2014 – 26 Juli 2014)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

a.n Ketua
Sekretaris,



Dr. Zainuri, M.Si
NIP 196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan FISIP
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PETERNAKAN
Jl. RA KARTINI NO.56 Telp. (0333) 412265
<http://www.banyuwangikab.go.id> E-mail disnak@banyuwangikab.go.id
B A N Y U W A N G I 68411

Banyuwangi, 30 september 2014

Nomor : 027/2640/429.104/2014
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada
Yth. Bpk. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Dan Politik Universitas

Perihal : **Rekomendasi Penelitian a.n.**
RADITYA DANDY HANDANA

Jember
Di-
J E M B E R

Menunjuk Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Nomor : 072/474/REKOM/429.214/2014 Tanggal 12 Mei 2014 Perihal: Rekomendasi Penelitian, Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa :

Nama/ NIM : RADITYA DANDY HANDANA / 070910201112

Telah melaksanakan penelitian dengan judul : Transparansi Pengelolaan Anggaran Pada Program Integrasi Ternak Unggas Pada Kelompok Blambangan Makmur Di Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi di Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi Terhitung mulai tanggal 26 Mei 2014 s.d 26 Juli 2014.

Demikian untuk menjadikan maklum.



KEPALA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUWANGI

Ir. HERU SANTOSO
Pembina Utama Muda
NIP. 19590212 198303 1 014

Tembusan Yth :

1. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik Kabupaten Banyuwangi
Di **BANYUWANGI**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH.Agus Salim No 109 Telp.0333 – 425119
BANYUWANGI 68425

Banyuwangi, 9 Juni 2014

Nomor : 072/214/REKOM/429.204/2014
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Ijin Penelitian**

Kepada Yth.
Yth. 1.Kepala Dinas Peternakan
2. Camat Srono
3. Kades Rejoagung Srono

di

BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
Tanggal : 26 Mei 2014
Nomor : 928/UN25.3.1/LT.5/2014
Bersama ini diberitahukan
Nama / NIM : **RADITYA DANDY HANDANA / 070910201112**

Bermaksud melaksanakan Penelitian :

Judul : Transparansi Pengelolaan Anggaran Pada Program Integrasi Ternak Unggas Pada Kelompok Blambangan Makmur di Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi
Tempat : Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi
Waktu : 26 Mei 2014 s.d. 26 Juli 2014

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat,data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan kepada peserta:

1. Wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Instansi setempat.
2. Melaporkan hasil Penelitian dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian harap menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI
Kabid Bina Ideologi,Pembauran dan Wawasan
Kebangsaan
Ub. Kasubbid Wawasan Kebangsaan

Tembusan :

Kepada Yth.
Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Jember



PEDOMAN WAWANCARA

1. Deskripsi Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi

- 1.1 Sejarah Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi
- 1.2 Visi dan misi
- 1.3 Profil kelompok
- 1.4 Struktur organisasi

2. Deskripsi Permasalahan

- 2.1 Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi
- 2.2 Informasi yang disajikan
- 2.3 Penanganan keluhan
- 2.4 Pertemuan masyarakat

3. Pertanyaan Dengan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi

- 3.1 Berkaitan dengan program integrasi ini, bagaimana gambaran mengenai program ini?
- 3.2 Bagaimana pihak dinas sendiri mensosialisasikan program ini kepada masyarakat?
- 3.3 Apakah pihak dinas pernah melakukan pertemuan dengan masyarakat terkait dengan program tersebut?
- 3.4 Seperti apa penetapan kelayakan penerima kelompok?
- 3.5 Apa pihak dinas tidak mensosialisasikan melalui internet, media lokal, radio dan sebagainya?
- 3.6 Apa tidak ada pertemuan sebelumnya dengan masyarakat?

4. Pertanyaan Dengan Sekretaris Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi

- 4.1 Setahu bapak selaku sekretaris dinas, apa selama ini program ini telah banyak diketahui oleh masyarakat, mengingat jumlah pengajuannya hanya 2 kelompok saja?
- 4.2 Seperti apa cara dinas memberikan informasi mengenai program kepada masyarakat?
- 4.3 Seperti apa informasi yang disajikan oleh dinas?
- 4.4 Apa sebelumnya ada kegiatan dengan masyarakat terkait program ini pak?
- 4.5 Jika ada kapan dilaksanakan?
- 4.6 Siapa saja yang waktu itu diundang?

5. Pertanyaan Dengan Bagian Bidang Kelembagaan Dan Budidaya Ternak

- 5.1 Apakah dari pusat sudah ditentukan berapa kuota kelompok yang menerima bantuan termasuk nama program dan jumlah anggaran?
- 5.2 Kapan pertama kali dinas memberikan informasi?
- 5.3 Bagaimana penyampaian informasi kepada masyarakat tentang program ini?
- 5.4 Bagaimana bentuk sosialisasi kepada masyarakat?
- 5.5 Seperti apa kriteria kelompok yang memang memenuhi syarat dari pengajuan program ini?
- 5.6 Berapa kelompok yang tertarik dan mengajukan proposal?
- 5.7 Bagaimana tata cara masyarakat dalam mengajukan klaim atau keluhan?
- 5.8 Apa ada masyarakat yang protes atau mengeluhkan berkaitan dengan program ini?
- 5.9 Bagaimana bapak menanggapi keluhan tersebut?
- 5.10 Apa ada tata cara khusus untuk mengadukan keluhan?
- 5.11 Selama program ini berjalan apa kendala yang dihadapi?
- 5.12 Seperti apa proses pelaksanaan program ini?
- 5.13 Berarti pihak kelompok tidak belanja sendiri pak?

- 5.14 Apakah ada tender dan apabila ada, apakah tender tersebut diumumkan?
- 5.15 Untuk pemeriksaan barang tersebut seperti apa prosesnya?
- 5.16 Siapa saja yang menghadiri serah terima barang?
- 5.17 Setelah proses ini selesai apa selanjutnya yang dilakukan pihak dinas ataupun kelompok pada program ini?
- 5.18 Apa sebelumnya terdapat kegiatan dengan masyarakat pak?

6. Pertanyaan Dengan Kelompok Blambangan Makmur

- 6.1 Seperti apa informasi yang disajikan oleh dinas?
- 6.2 Kapan pertama kali mendapat informasi?
- 6.3 Apa informasi tersebut menurut bapak sudah layak disampaikan?
- 6.4 Sudah berapa kali studi banding dilakukan dan siapa saja yang mengikuti?
- 6.5 Apa sebelumnya ada kegiatan pertemuan dengan masyarakat?
- 6.6 Apa bapak pernah mengajukan kritik pada pelaksanaan program ini?
- 6.7 Apa menurut bapak prosedur penanganan keluhan sudah sesuai harapan?

7. Pertanyaan Dengan Perangkat Desa

- 7.1 Dari mana mengetahui program ini?
- 7.2 Kapan pertama kali mendapat informasi mengenai program?
- 7.3 Apa informasi ini sudah cukup bagus penyampaiannya?
- 7.4 Apa sebelumnya ada pertemuan dengan masyarakat sebelum program ini dilaksanakan?
- 7.5 Apakah pertemuan dengan masyarakat sudah dirasa terwakili?
- 7.6 Apa pernah melakukan klaim atau pengaduan terkait dengan pelaksanaan program ini?
- 7.7 Apakah penanganan keluhan sudah sesuai dengan harapan?

8. Pertanyaan Dengan Anggota Masyarakat

- 8.1 Dari mana mengetahui program ini?
- 8.2 Seperti apa bentuk informasi yang diberikan oleh pihak dinas?
- 8.3 Apakah pemberian informasi tersebut sudah dirasa efektif?
- 8.4 Adakah sosialisasi / pertemuan sebelumnya mengenai program?

9. Pertanyaan Dengan Kelompok Prabu Blambangan

- 9.1 Bagaimana alur pemberian informasi program ini kepada bapak?
- 9.2 Menurut bapak apakah bentuk informasi seperti ini sudah cukup
- 9.3 Perlukah media lain seperti internet atau sosial media untuk menyampaikan?
- 9.4 Seperti apa sosialisasi yang diberikan?